

**EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM  
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP  
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Oleh:

**YULIDHIN KHOIRUL ASWANAH  
NIM. 0810840009**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**

**EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM  
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP  
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih gelar Sarjana Perikanan di  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Universitas Brawijaya**

Oleh:  
**YULIDHIN KHOIRUL ASWANAH**  
**NIM. 0810840009**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**

SKRIPSI

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM  
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP  
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Oleh :  
YULIDHIN KHOIRUL ASWANAH  
NIM. 0810840009

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 2 Oktober 2012  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Dosen Penguji I

Dr. Ir Nuddin Harahap, MP  
NIP. 19610417 199003 1 001  
Tanggal :

Dosen Penguji II

Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP  
NIP. 19640228 198903 2 011  
Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Anthon Efani, MP  
NIP. 19650717 199103 1 006  
Tanggal :

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS  
NIP. 19630820 198802 1 001  
Tanggal :

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP  
NIP. 19610417 199003 1 001  
Tanggal :

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Oktober 2012

Mahasiswa

YULIDHIN KHOIRUL ASWANAH



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, laporan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

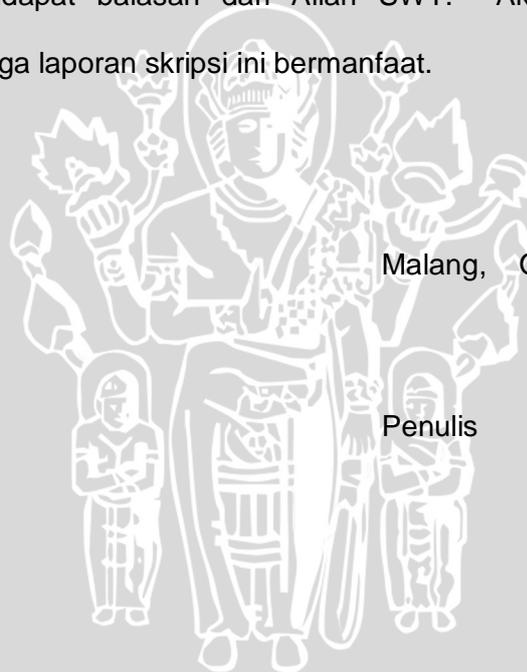
1. Kedua orang tuaku tercinta, atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan do'a – do'anya.
2. Bapak Dr. Ir. Anthon Efani, MP dan Dr.Ir. Agus Tjahjono, MS selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP dan Ibu Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi.
4. Bapak Ir. Ismadi, MS yang telah memfasilitasi literatur-literatur yang dibutuhkan selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh pihak dari instansi terkait ; Dinas PPN Brondong, DKP dan Bappeda Kabupaten Lamongan serta para responden atas kerjasamanya selama penelitian.
6. Mas Igo Sukma Permana S. Pi yang telah memberikan informasi dan arahan selama penelitian.
7. Mbah Suminah beserta keluarga yang telah membantu dan memberi tempat tinggal yang nyaman selama penelitian
7. Keluarga serta sahabat terbaikku "*you are my spirit*",
  - Adikku tercinta Whiliyan Babat Arung Samudera, sepupuku mbak Yenny Sudarwanto, mas Akhmad Khanif Lasmana dan seluruh keluarga di rumah.

- Alif K.J, Ady Surya, Yusuf A.S, Anggit Juliadi, mas Anton, Zein kautsar, Ngudi Hayu, Ilham Winata dan seluruh teman-teman FOKSI.
- Maryam, Saiful, Dian, Teguh, Novi, Bagus, Renaldy, Fery, Rizki, Vivi, Maila, Agni dan seluruh teman-teman SEPK'08.
- Mbak Dina, mas Abay, Ndaru, Taufik dan seluruh teman-teman LPM AQUA.
- Teman-teman Kerto Pamuji 70; Titin, Fira, Erike, Puspa, Firsty, Risa dan mbak Fitri.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya, semoga kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, dengan kerendahan hati semoga laporan skripsi ini bermanfaat.

Malang, Oktober 2012

Penulis



## RINGKASAN

**YULIDHIN KHOIRUL ASWANAH**, Laporan Skripsi Tentang Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. (di bawah bimbingan **Dr. Ir. ANTHON EFANI, MP** dan **Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS**).

---

Sumberdaya sektor perikanan berpotensi dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat disegala bidang maka kebijakan pembangunan perikanan memerlukan perubahan atau penyesuaian. Kebijakan terobosan yang dicanangkan oleh KKP adalah melalui Revolusi Biru (perubahan cara berpikir dari daratan ke maritim) yang diimplementasikan melalui konsep minapolitan. Minapolitan yaitu konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan, dengan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Ada tiga sektor utama dalam program minapolitan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sentra garam. Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan no.39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap dan budidaya. Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada minapolitan berbasis perikanan tangkap karena peneliti menilai sektor ini rawan penyimpangan terhadap implementasi program minapolitan. Karakteristik perikanan tangkap bersifat *common property* dan *open access*, masalah lainnya adalah terbatasnya modal dan teknologi penangkapan ikan, rendahnya kualitas SDM nelayan, lemahnya pengawasan, data statistik perikanan tangkap yang kurang akurat, sehingga kenyataannya dibutuhkan persiapan dan pembenahan yang menyeluruh sebelum tahap implementasi program. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi implementasi dari program minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong, sebagai zona inti kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi : 1) Profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan, 2) Indeks kesiapan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program minapolitan perikanan tangkap, 3) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan 4) Komitmen Pemerintah Daerah Lamongan dalam pengembangan kawasan minapolitan, 5) Partisipasi masyarakat nelayan dalam memahami, mengikuti dan mendukung program pengembangan kawasan minapolitan, 6) Faktor pendukung dan penghambat program minapolitan perikanan tangkap di kawasan PPN Brondong.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan PPN Brondong yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada bulan Mei sampai Juni 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pengambilan sampelnya menggunakan *metode purposive sampling* untuk penggalan data pada *stakeholders*, dan menggunakan metode insidental sampling untuk mencari responden nelayan dengan jumlah responden yang ditentukan berdasarkan rumus *Linear Time Function* diperoleh sebesar 48 sampel. Data primer diperoleh dengan wawancara, observasi dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi.

Profil program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan No 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*. Berdasarkan SK Bupati tersebut ditetapkan juga tim POKJA (Kelompok Kerja) untuk membantu melaksanakan peran pemerintah dalam pengembangan kawasan minapolitan dan komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Secara umum minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di pusat kegiatan (minapolis) dan kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*).

Dari keragaan awal kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan berdasarkan kondisi enam pilar minapolitan (infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan *governance*) maka diperoleh indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan sebesar 78,25. Ini berarti Kabupaten Lamongan dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan di PPN Brondong dalam kategori siap melaksanakan program minapolitan namun dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan.

Perencanaan program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan disusun dengan sasaran program yaitu : 1) Perbaikan sumberdaya ikan, 2) Perbaikan desain palkah kapal penangkapan ikan, 3) Pembangunan ekonomi kerakyatan, 4) Pembangunan infrastruktur, 5) Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Secara keseluruhan perencanaan program ini dituangkan dalam rencana aksi berupa matrik pogram kegiatan yang tersusun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Matrik program kegiatan ini terdiri dari tiga kelompok kegiatan yaitu pembangunan infrastruktur, kegiatan perikanan dan kegiatan non perikanan.

Implementasi dari program ini adalah realisasi dari matrik program yang telah tersusun. Dari 63 kegiatan yang tersusun untuk direalisasikan pada tahun 2012, sampai saat ini hanya enam kegiatan yang terlaksana, dan sembilan kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang. Dalam tahap implementasi, baik tingkat kemajuan pelaksanaan program maupun waktu pelaksanaan belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu; keterbatasan anggaran dana, kurangnya koordinasi antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat, kurangnya antusiasme implementator dalam penyelenggaraan program akibat dari perubahan struktur birokrasi baik di tataran pusat maupun pelaksana program itu sendiri, kurangnya pemahaman masyarakat terkait arah kebijakan program.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap pelaksanaan program minapolitan cukup tinggi terbukti dengan terpenuhinya persyaratan administratif berupa SK kawasan dan SK POKJA, kesesuaian dengan RTRW daerah, masuk ke dalam RPIJMD, terbentuk *masterplan* program, kontribusi APBD dan berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat dalam bentuk rapat koordinasi.

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program serta sebagai tolok ukur terhadap pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap tujuan kebijakan. Responden yang diambil sebagai sampel

untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini adalah masyarakat pelaku usaha penangkapan atau nelayan, baik itu pemilik kapal, nahkoda maupun ABK dengan tidak mempermasalahkan perbedaan alat tangkap yang digunakan. Dalam penelitian ini, partisipasi nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu 1) partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan, 2) partisipasi nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan. Diperoleh skor untuk partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan program minapolitan sangat minim yaitu sebanyak 8,92 %. Selain disebabkan karena kualitas SDM nelayan yang masih rendah serta sifat apatis nelayan terhadap kebijakan pemerintah, hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sendiri terkait program minapolitan.

Partisipasi masyarakat nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan di PPN Brondong, yaitu meliputi partisipasi dalam pemanfaatan fasilitas (sarana dan prasarana) sebesar 23,8 %, partisipasi dalam kegiatan organisasi sebesar 40,83 %, partisipasi dalam mematuhi tata tertib sebesar 65,8 %, dan tingkat kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi sebesar 63 %. Faktor utama penyebab minimnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya kesadaran nelayan terhadap manfaat dari fasilitas yang disediakan maupun manfaat dari organisasi.

Berdasarkan hasil semua data yang terhimpun, maka dapat dijabarkan faktor – faktor pendukung dan penghambat program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan. Faktor-faktor pendukungnya yaitu: pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan tipe B, letak geografis Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai kota penyangga/ pendukung Kota Propinsi (Surabaya), Permintaan ikan segar maupun olahan oleh pasar masih sangat tinggi, sebagian besar nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu: rendahnya kualitas SDM, sumberdaya perikanan di Laut Jawa mengalami *over fishing*, adanya keterbatasan dana, pelelangan di TPI kurang berfungsi, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. .

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran yang bisa diberikan untuk menunjang keberlanjutan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan yaitu 1) pemerintah hendaknya menyeimbangkan pertumbuhan keenam pilar minapolitan dengan lebih memperkuat kelembagaan dan kebijakan, 2) pemerintah daerah hendaknya mencari sumber pendanaan lain yang sah, misalnya dari BUMD sebagai alternatif untuk menambah kekurangan dana, 3) perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat, 4) perlu adanya pembentukan *Marine Protected Area* (MPA) basis masyarakat melalui optimalisasi peran POKMASWAS.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan terkait minapolitan perikanan tangkap yang meliputi : profil, tingkat kesiapan, perencanaan, implementasi, komitmen Pemda, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat program. Penulis sangat menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuan diri penulis. Oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih terhadap berbagai masukan, saran dan kritikan yang membangun untuk dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan yang ada demi kesempurnaan laporan ini dan di masa-masa yang akan datang.

Malang, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	iii
RINGKASAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Kegunaan penelitian .....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Profil program minapolitan perikanan tangkap .....	9
2.1.1 Definisi minapolitan .....	9
2.1.2 Tujuan minapolitan .....	10
2.1.3 Karakteristik kawasan minapolitan .....	10
2.2 Tingkat kesiapan pelaksanaan program minapolitan .....	11
2.2.1 Enam pilar pembangunan minapolitan .....	11
2.2.2 Indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan .....	13
2.3 Perencanaan program .....	15
2.3.1 Teori perencanaan program .....	15
2.3.2 Perencanaan program minapolitan .....	16
2.4 Implementasi program .....	19
2.4.1 Teori implementasi program .....	19
2.4.2 Implementasi program minapolitan .....	22
2.5 Pengembangan kawasan minapolitan .....	26

2.5.1 Persyaratan kawasan minapolitan .....	26
2.5.2 Tata laksana pengembangan kawasan minapolitan.....	27
2.5.3 Kelembagaan minapolitan .....	30
2.6 Komitmen pemerintah daerah .....	30
2.7 Partisipasi masyarakat.....	32
2.8 Faktor penghambat dan pendukung program.....	33
2.9 Hasil penelitian terdahulu .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis penelitian .....	37
3.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	38
3.3 Fokus penelitian .....	39
3.4 Populasi dan sampel.....	39
3.5 Metode pengambilan sampel .....	40
3.6 Jenis dan sumber data .....	42
3.6.1 Data primer .....	42
3.6.2 Data sekunder.....	43
3.7 Teknik pengumpulan data .....	43
3.7.1 Wawancara.....	43
3.7.2 Observasi.....	44
3.7.3 Dokumentasi.....	45
3.7.4 Kuesioner.....	46
3.8 Analisa data .....	46
3.9 Kerangka berpikir.....	53
<b>IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Gambaran umum Kabupaten Lamongan.....	56
4.1.1 Letak geografis .....	56
4.1.2 Keadaan topografi .....	57
4.1.3 Keadaan penduduk.....	57
4.1.4 Potensi perikanan tangkap.....	57
4.2 Gambaran umum daerah kawasan minapolitan .....	59
4.2.1 Kecamatan Brondong.....	60
4.2.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong .....	62

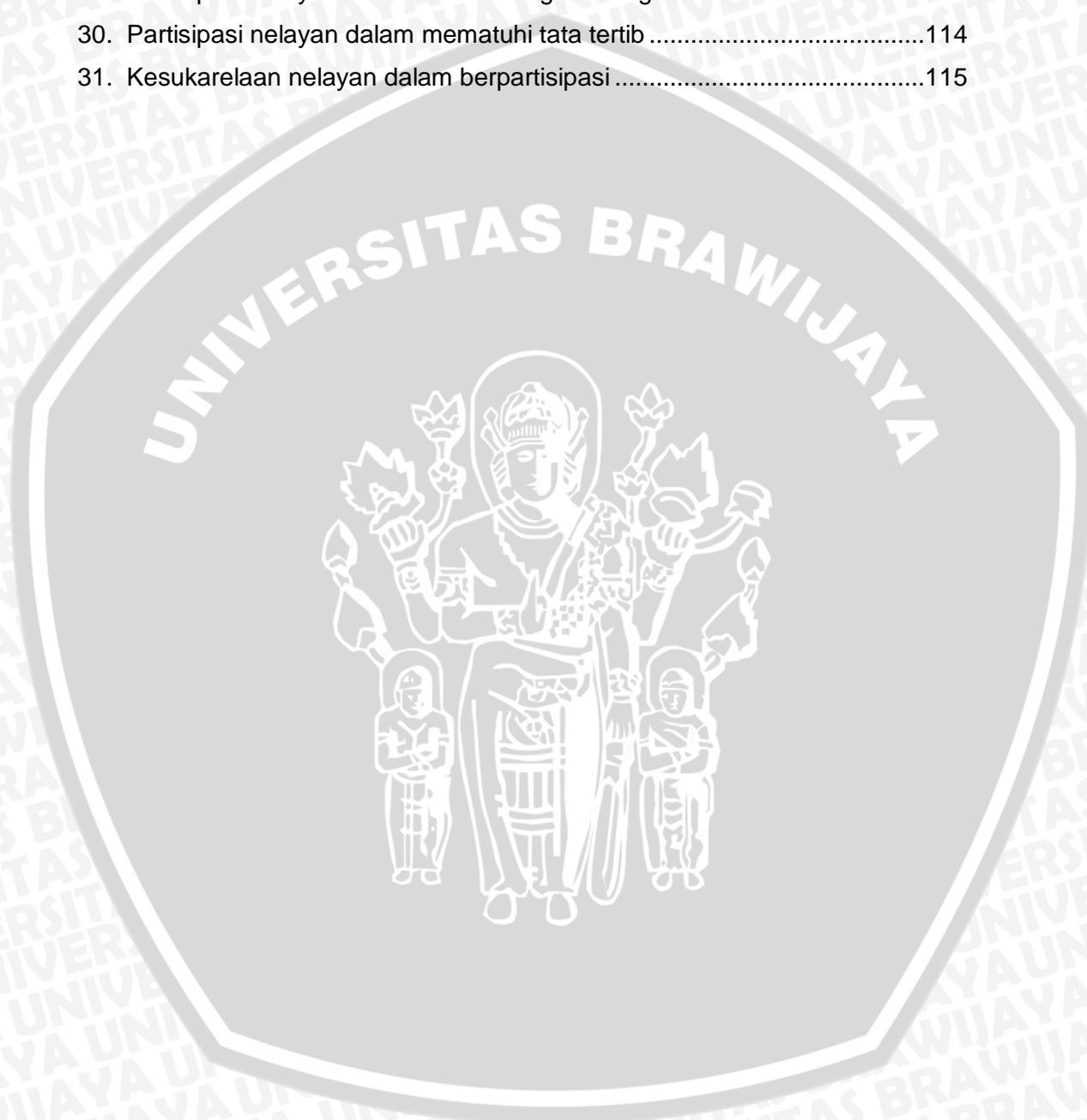


V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	68
5.1 Profil minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Lamongan .....	68
5.1.1 Visi dan misi.....	68
5.1.2 Kawasan minapolitan.....	69
5.1.3 Komoditas unggulan .....	69
5.1.4 Pengelolah minapolitan .....	70
5.2 Tingkat kesiapan pelaksanaan minapolitan .....	71
5.2.1 Kondisi enam pilar pembangunan minapolitan .....	72
5.2.2 Perhitungan indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan.....	87
5.3 Konsistensi antara perencanaan dan implemetasi program minapolitan..	91
5.3.1 Perencanaan program minapolitan .....	91
5.3.2 Implementasi program minapolitan .....	93
5.3.3 Evaluasi terhadap konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan .....	100
5.4 Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan .....	102
5.5 Partisipasi masyarakat.....	104
5.5.1 Karakteristik responden.....	105
5.5.2 Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan .....	107
5.5.3 Partisipasi nelayan dalam mendukung program pengembangan kawasan minapolitan.....	109
5.6 Faktor-faktor pendukung dan penghambat program .....	116
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	119
6.1 Kesimpulan .....	119
6.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	125

## DAFTAR TABEL

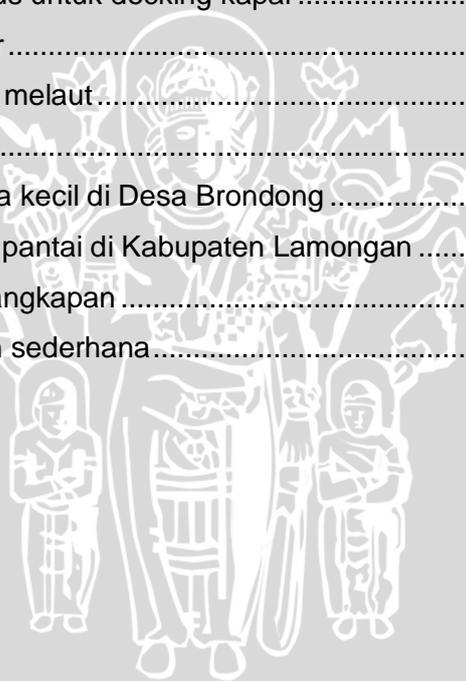
Tabel	Halaman
1. Indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan.....	48
2. Data masing-masing variabel terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.....	51
3. Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan .....	52
4. Partisipasi nelayan dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan.....	52
5. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin.....	58
6. Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Brondong.....	61
7. Jumlah penduduk Kecamatan Brondong berdasarkan mata pencaharian	61
8. Daftar pegawai pelabuhan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan	63
9. Pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelabuhan .....	64
10. Pemanfaatan lahan oleh pihak umum .....	64
11. Fasilitas pokok PPN Brondong .....	65
12. Fasilitas penunjang PPN Brondong .....	66
13. Fasilitas fungsional PPN Brondong.....	67
14. Kegiatan operasional di PPN Brondong .....	67
15. Susunan tim POKJA minapolitan Kabupaten Lamongan .....	70
16. Jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam areal pelabuhan 2011 .....	77
17. Usaha perikanan skala kecil di Kec. Brondong dan Kec. Paciran .....	78
18. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan tahun 2002 – 2011.....	79
19. Jenis ikan olahan tahun 2002 – 2011 .....	79
20. Usaha perikanan skala besar di Kec. Brondong dan Kec. Paciran.....	80
21. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Brondong tahun 2011 .....	81
22. Indeks kesiapan PPN Brondong sebagai kawasan minapolitan .....	88
23. Perbandingan kegiatan minapolitan yang sudah terlaksana dengan perencanaan.....	94
24. Analisis antara perencanaan dan pelaksanaan program minapolitan .....	100
25. Analisis komitmen pemerintah daerah terhadap program minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong.....	102

26. Karakteristik responden.....	105
27. Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan .....	107
28. Tingkat partisipasi nelayan berdasarkan pemanfaatan fasilitas.....	110
29. Partisipasi nelayan melalui aktif di kegiatan organisasi.....	112
30. Partisipasi nelayan dalam mematuhi tata tertib .....	114
31. Kesukarelaan nelayan dalam berpartisipasi .....	115



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model eksisting minapolitan .....	23
2. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan .....	24
3. Kerangka implementasi model praktikal minapolitan .....	25
4. Kerangka berpikir .....	55
5. Struktur organisasi PPN Brondong .....	63
6. (a) ikan tongkol, (b) ikan layang, (c) ikan kembung, dan (d) ikan kuniran	70
7. Area parkir kapal kurang tertib .....	73
8. Belum ada area khusus untuk docking kapal .....	74
9. Bangunan Breakwater .....	74
10. Pengisian perbekalan melaut .....	75
11. Kondisi TPI Brondong .....	76
12. Usaha perikanan skala kecil di Desa Brondong .....	78
13. Pemanfaatan wilayah pantai di Kabupaten Lamongan .....	82
14. Alat dan armada penangkapan .....	85
15. Teknologi pengolahan sederhana .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Lamongan dan masterplan pengembangan kawasan PPN Brondong.....	125
2. Beberapa fasilitas penunjang di PPN Brondong.....	126
3. Masterplan fasilitas penunjang di PPN Brondong .....	128
4. Matrik program minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Lamongan tahun 2012 .....	130



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumberdaya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas serta memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Walaupun sektor perikanan memiliki peran yang penting, akan tetapi sampai saat ini peran dan potensi tersebut belum dikelola secara optimal baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Keunggulan komparatif yang dimiliki belum mampu untuk ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kinerja sektor ekonomi berbasis perikanan.

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik secara internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan perubahan atau penyesuaian. Sebuah penanganan yang cepat dan tepat mutlak dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebuah kebijakan terobosan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) adalah melalui Revolusi Biru, yaitu sebuah perubahan cara berpikir dari daratan ke maritim. Revolusi Biru telah mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada

wilayah daratan telah meluas pada pembangunan wilayah maritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. KKP-RI melalui misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai visi “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”, merealisasikan kebijakan tersebut melalui program minapolitan.

Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2010 sekaligus pencetus program minapolitan Fadel Muhammad menjelaskan bahwa, program minapolitan merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak disektor kelautan dan perikanan. Sistem manajemen kawasan minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi (KKP, 2010). Ada tiga sektor utama dalam program minapolitan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam. Pada tahun 2011, KKP telah memfokuskan perhatian kepada pengembangan minapolitan percontohan di 41 lokasi yaitu 9 lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, 24 lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya, dan delapan lokasi sentra garam. Pelaksanaan program itu akan terus diperluas hingga menjadi 197 lokasi pada tahun 2014 (Medanbisnis.co.id, 2011).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagai kawasan ke-103 dari 223 lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, dengan basis perikanan tangkap dan budidaya. Dalam penelitian ini pembahasan dibatasi hanya pada minapolitan perikanan tangkap, karena berdasarkan analisis peneliti sektor penangkapan rawan terhadap implementasi program minapolitan.

Seperti yang kita ketahui, karakteristik sektor perikanan tangkap bersifat *common property* (kepemilikan bersama) dan *open access* sehingga rawan eksploitasi. Tujuan program minapolitan yang menargetkan peningkatan

produksi dalam jumlah besar terkesan kontradiksi dengan kondisi perairan Indonesia yang sebagian besar dinyatakan mengalami *over fishing*. Sedangkan masalah klasik yang masih membelit sektor perikanan tangkap hingga saat ini adalah terbatasnya modal dan teknologi penangkapan ikan, rendahnya kualitas SDM nelayan, lemahnya pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan, serta data statistik produksi perikanan tangkap yang kurang akurat. Sehingga kenyataannya, dibutuhkan persiapan dan pembenahan yang menyeluruh sebelum tahap implementasi program.

Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di seluruh nusantara ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimana untuk tahap awal meliputi daerah Ambon, Ternate, Bitung, Muncar, Tamperan, Cilacap, Sukabumi, Bangka Belitung dan Belawan. Tahap selanjutnya yaitu daerah Pekalongan, Amurang, Brondong, Bulukumba, Tanjungpandan, Pemangkat, Danau Toba, Palembang, Kabupaten Kerinci, Padang, dan Sibolga (Batavia.co.id, 2011).

Untuk mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai kawasan minapolitan, pengelola PPN Pantura Lamongan telah menyusun *business plan*. Salah satu konsepnya adalah menjadikan PPN Brondong sebagai *mall* perikanan, dengan menggandeng investor swasta di bidang perbengkelan dan *docking*, pabrik es dan *cold storage*. Sebagai daya dukung perikanan tangkap di pantura Lamongan telah beroperasi delapan unit industri pengolahan ikan, sekitar 252 unit pengolahan skala rumah tangga, lima sentra produksi perikanan tangkap, 28.154 nelayan dengan produksi ikan tahun 2010 mencapai 61.431 ton, serta 7.526 unit armada perikanan tangkap dengan bobot mati 5 hingga 20 GT (*gross tonnage*) dan jumlah alat tangkap mencapai 8.395 unit (Surabayapost.co.id, 2011).

PPN Brondong juga telah melakukan pembenahan fisik sejak 2005 yang menelan dana hingga Rp 47,1 miliar. Dana itu diantaranya digunakan untuk

pekerjaan turap 524 meter dan 292 meter, reklamasi seluas 8 hektare (ha), *break water* sepanjang 40 meter, pembangunan dermaga sepanjang 363 meter dan pembangunan jalan kompleks. Pengembangan kawasan minapolitan di Lamongan sudah memiliki legal aspek, karena telah tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (Megapost.co.id, 2011).

Namun demikian, menurut hasil penelitian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (BBRSEPK), dalam tahap implementasi pengembangan kawasan minapolitan perlu didukung berbagai pilar pembangunan minapolitan yaitu infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, serta kebijakan dan *governance*. Karena pertumbuhan ekonomi dikawasan minapolitan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama kebocoran ekonomi. Sehingga minapolitan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi multi-sektoral merupakan megaprojek yang patut dikawal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Kekhawatiran ini juga diperparah dengan struktur pelaku pemerintahan kita yang sering berubah-ubah, termasuk *reshuffle* Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad sebagai pencetus minapolitan, dan digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo yang membawa program baru yaitu Industrialisasi Perikanan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah implementasi dari program minapolitan kedepannya, mengingat sejauh ini program minapolitan baru dalam tahap persiapan.

Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila pada saat perencanaan dirumuskan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada di lapang, diimplementasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, adanya komitmen yang tinggi dari setiap *stakeholder*, dipahami dan melibatkan

peran serta masyarakat. Dengan demikian, maka akan timbul kerja sama yang baik antara pemberi kebijakan, pelaksana dan penerima kebijakan.

Minapolitan ialah proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program minapolitan harus dievaluasi untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program (Wiadnya, 2011). Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan dan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan (Suharto, 2008).

Pentingnya evaluasi agar setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena ada perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan demikian tidak berlarut-larut sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai informasi dasar bagi pengelola dalam memperbaiki atau memperbaharui program ke depan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan maupun implementasi program minapolitan mutlak dibutuhkan termasuk dari perguruan tinggi atau akademisi.

Sejalan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana profil minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong, sejauh mana tingkat kesiapannya dalam pelaksanaan program minapolitan, konsistensi antara perencanaan dan implementasi programnya, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya pengembangan kawasan, partisipasi masyarakat nelayan serta faktor pendukung dan penghambat program tersebut dengan judul penelitian **“Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan**

## **Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur”.**

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang menunjang keberlanjutan program, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Minapolitan merupakan program yang dicanangkan di beberapa daerah di Indonesia dengan proses pelaksanaan yang bertahap antar daerah. Oleh karena itu, hasil dari penerapan program di daerah yang lebih dahulu terlaksana bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi penerapan program di daerah selanjutnya. Meninjau program minapolitan perikanan tangkap di PPN Ratu dan PPS Bitung, berdasarkan hasil riset BBRSEPK, PPN Ratu memiliki indeks kesiapan pelaksanaan program sebesar 78,55. Sedangkan PPS Bitung memiliki indeks kesiapan pelaksanaan program sebesar 80,5. Dengan demikian kedua pelabuhan tersebut termasuk dalam kriteria siap melaksanakan program minapolitan tetapi dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan (Zulham dkk, 2010). Hal ini bisa dijadikan perbandingan sejauh mana kesiapan PPN Brondong untuk melaksanakan program minapolitan perikanan tangkap.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimanakah tingkat kesiapan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program minapolitan perikanan tangkap?
3. Bagaimanakah konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan?

4. Bagaimanakah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat nelayan terhadap program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di kawasan PPN Brondong?
6. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi :

1. Profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan
2. Tingkat kesiapan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program minapolitan perikanan tangkap
3. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan
4. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong
5. Tingkat partisipasi masyarakat nelayan terhadap program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di kawasan PPN Brondong
6. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan program minapolitan khususnya minapolitan berbasis perikanan tangkap.

2. Masyarakat nelayan

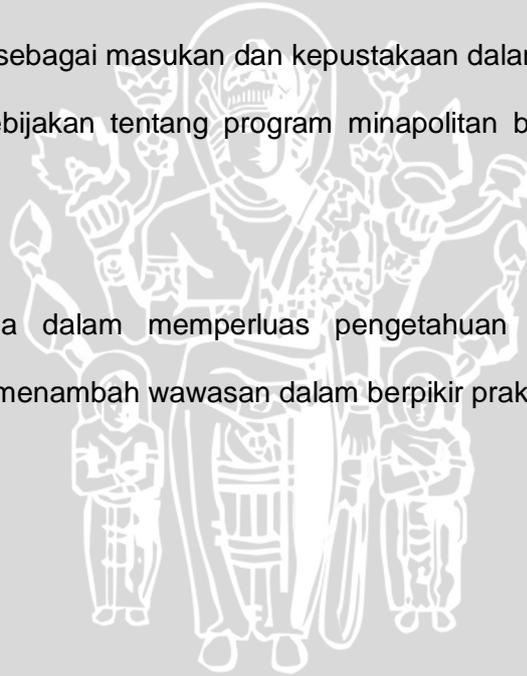
Sebagai sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat memahami, menerima dan menyikapi program tersebut.

3. Perguruan tinggi

Dapat dijadikan sebagai masukan dan kepustakaan dalam melakukan studi implementasi kebijakan tentang program minapolitan berbasis perikanan tangkap.

4. Peneliti

Sebagai wacana dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Profil Minapolitan Perikanan Tangkap

#### 2.1.1 Definisi Minapolitan

Secara umum definisi program minapolitan menurut KKP (2011), merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak disektor kelautan dan perikanan. Sistem manajemen kawasan minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi.
3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia.
4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.

Minapolitan Perikanan Tangkap didefinisikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk

menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Konsep manajemen pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem manajemen perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Disamping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, SPDN/SPBN, unit pengolahan ikan, pabrik es dan unit pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan (www.HKTI.org, 2011).

### **2.1.2 Tujuan Minapolitan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tentang Pedoman Umum Minapolitan Tahun 2011, tujuan minapolitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil dan merata
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah

### **2.1.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan**

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, maka kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau

kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan akan dijadikan kawasan ekonomi unggulan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karakteristik kawasan minapolitan meliputi :

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi
3. Menampung dan memperkerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

Batasan kawasan minapolitan bukan berdasarkan wilayah administratif namun terdiri dari zona inti, zona pengembangan, batas koordinat RUTR zona perikanan, dan zona keterkaitan. Sedangkan lokasi kegiatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Zulham, 2010).

## **2.2 Tingkat Kesiapan Pelaksanaan Program Minapolitan**

Tingkat kesiapan pelaksanaan minapolitan dapat diketahui dengan cara mengukur nilai indeksinya. Menurut Zulham (2010), Indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan merupakan keragaan awal dari kawasan tersebut dalam melaksanakan minapolitan berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Kesiapan pelaksanaan minapolitan tersebut tetap mengacu pada enam pilar minapolitan.

### **2.2.1 Enam Pilar Pembangunan Minapolitan**

Enam pilar pembangunan minapolitan menurut Zulham (2010) adalah sebagai berikut :

1. Pilar pembangunan infrastruktur. Aspek perangkat keras dan lunak infrastruktur mencakup kondisi sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik (tata kelola) yang sesuai untuk mendorong terciptanya kemandirian kawasan pedesaan kelautan dan perikanan sebagai pusat bisnis, sesuai dengan keruangan (ekosistem) dan keterkaitan fungsional suatu kawasan minapolitan.
2. Pilar masyarakat dan bisnis. Merupakan sistem masyarakat yang akan berfungsi sebagai pelaksana pembangunan kawasan minapolitan yang kesejahteraannya harus ditingkatkan baik pangan melalui berkembangnya kegiatan mina bisnis. Masyarakat tersebut harus teridentifikasi tingkat kemajuannya, termasuk kearifan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat pada kawasan tersebut.
3. Pilar sumberdaya dan tata ruang. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan subsistem yang menjadi modal dasar dalam penetapan dan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap laut. Pemahaman tentang sumberdaya ini diperlukan untuk menentukan komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan memiliki dampak pengganda yang besar jika dikembangkan dengan skala ekonomi dan sesuai dengan tata ruang serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pilar kelembagaan. Merupakan kondisi yang menggambarkan sejauh mana keberadaan kelembagaan yang berkaitan dengan mina bisnis pada kawasan yang diidentifikasi. Baik terkait input, proses dan output, maupun kelembagaan pelaku utama, serta kelembagaan penunjang lainnya yang berkaitan dengan produksi dan nilai tambah produk.
5. Pilar teknologi. Teknologi merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan dari minapolitan pada berbagai tipologi kelautan dan perikanan. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, pasca produksi dan distribusi

hasil perikanan akan mendorong efisiensi ekonomi dan daya saing produk perikanan.

6. Pilar kebijakan dan *governance*. Merupakan kondisi kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang kondusif untuk dapat terciptanya kemandirian kawasan pedesaan kelautan dan perikanan (baik pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan pedesaan) sesuai dengan fungsi keruangan dan keterkaitan fungsional suatu kawasan minapolitan.

### 2.2.2 Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan

Menurut Zulham (2010), dalam perhitungan indeks, total bobot dari keenam pilar tersebut adalah 100, dan masing-masing pilar minapolitan memiliki bobot yang berbeda. Bobot dari pilar infrastruktur, masyarakat dan bisnis masing-masing adalah 20, sedangkan bobot dari pilar kelembagaan, teknologi, serta kebijakan dan *governance* masing-masing adalah 15. Perbedaan bobot tersebut didasarkan pada prioritas dari setiap pilar.

Zulham (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa pada kasus minapolitan, infrastruktur serta masyarakat dan bisnis diasumsikan merupakan prioritas utama karena tanpa infrastruktur dan dukungan masyarakat maka program minapolitan sulit terwujud. Sedangkan kelembagaan, teknologi dan kebijakan maupun sumberdaya dan tata ruang merupakan aspek yang sifatnya harus diintervensi atau direkayasa dalam rangka mendorong berfungsinya minapolitan. Setiap pilar minapolitan mempunyai kriteria kesiapan utama dengan bobot yang berbeda. Indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan diturunkan dari penilaian dari kriteria kesiapan utama. Kriteria kesiapan utama untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

1. Pilar infrastruktur :
  - a. Fungsi dermaga pendaratan ikan

- b. Keberadaan dan peran pabrik es
  - c. Persediaan pasokan listrik
  - d. Kondisi kolam pelabuhan
  - e. Kecukupan pasokan BBM
  - f. Ketersediaan pasokan air bersih
  - g. Kondisi jalan raya
  - h. Kondisi transportasi dan logistik
  - i. Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan
2. Masyarakat dan Bisnis
    - a. Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan
    - b. Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan
    - c. Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan
    - d. Kemampuan penduduk lokal memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan
3. Sumberdaya dan tata ruang
    - a. Ketersediaan dokumen RTRW
    - b. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan, ketersediaan TK
    - c. Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan
4. Kelembagaan
    - a. SK Bupati/ Walikota tentang penetapan kawasan minapolitan
    - b. SK Bupati/ Walikota tentang kelompok kerja pengelolaan kawasan minapolitan
    - c. Persepsi kelembagaan formal tentang minapolitan
    - d. Persepsi masyarakat tentang minapolitan
5. Teknologi
    - a. Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan

- b. Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengolahan ikan
  - c. Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan
6. Kebijakan dan *Governance*
- a. Persepsi pemda tentang minapolitan
  - b. Komitmen pemda tentang minapolitan
  - c. Strategi implementasi model minapolitan

## 2.3 Perencanaan Program

### 2.3.1 Teori Perencanaan Program

Menurut Karding (2008), program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.<sup>33</sup>
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Lebih lanjut Karding (2008) menjelaskan pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Mardikanto (1993) dalam Yustina (2003) mendefinisikan perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan program sebagai upaya sadar yang dirancang atau dirumuskan guna tercapainya tujuan (Kebutuhan, keinginan, minat) masyarakat, untuk siapa program tersebut ditujukan. Di dalam perencanaan program, sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang menyangkut: hal-hal, waktu, dan cara kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dilaksanakan. Perencanaan program merupakan proses berkelanjutan, melalui mana warga masyarakat merumuskan kegiatan-kegiatan yang berupa serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat setempat.

### **2.3.2 Perencanaan Minapolitan**

Untuk mengetahui perencanaan dari program minapolitan maka dapat dilihat dari konsep dan strategi minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

#### **a. Konsep Minapolitan**

Secara konseptual minapolitan memiliki 2 unsur utama yaitu minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah, dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Konsep minapolitan didasarkan pada tiga asas yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan penguatan

peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang ada pada umumnya berada di pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan. Definisi minapolitan menurut Zulham (2010) yaitu, minapolitan adalah kawasan pembangunan pedesaan dengan infrastruktur setara kota yang tumbuh berkelanjutan sebagai sistem produksi berbasis sumberdaya dan atau komoditas kelautan dan perikanan unggulan lokal, berorientasi pasar, serta memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dalam satuan sistem minabisnis dan pemukiman.

Dengan konsep minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada diperkotaan perlu dikembangkan dipedesaan. Seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

## b. Strategi Minapolitan

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Kampanye nasional melalui media massa, komunikasi antar lembaga dan pameran
2. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil
3. Mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan /atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan
4. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan dan/ atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis
5. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah

Sasaran peningkatan produksi dengan konsep minapolitan berbasis perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan perikanan dan TPI menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan
- b. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan

Dengan bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan

- Meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya
- Revitalisasi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, *cold storage* dan pabrik es
- Revitalisasi prasarana, seperti jalan, air bersih dan listrik
- Bantuan teknis dan permodalan, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan dan TPI
- Mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih dan sehat
- Menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat
- Restrukturisasi armada, wilayah penangkapan dan perizinan
- Pengkayaan stok ikan (*stock enhancement*) sebagai penyangga produksi
- Pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak
- Mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu

Pengembangan konsep minapolitan pada kawasan perikanan memerlukan sekurang-kurangnya tiga langkah, agar minapolitan tersebut dapat berkembang dan menjadi bagian dari program nasional. Langkah pertama penetapan dasar hukum agar minapolitan menjadi program nasional. Langkah kedua adalah penentuan lokasi minapolitan. Langkah ketiga adalah implementasi rancang bangun minapolitan pada kawasan perikanan (Zulham, 2010).

## 2.4 Implementasi Program

### 2.4.1 Teori Implementasi Program

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Akib dan Tarigan, 2008). Mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses

implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Setyadi, 2005).

Teori Implementasi menurut Edward (1980), menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi dan konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan :

#### 1. Komunikasi (*communications*)

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan

komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

## 2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Berkenaan dengan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

- a. Sumberdaya manusia : merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- b. Informasi : merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- c. Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
- d. Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- e. Pendanaan : membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasi suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### 3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

### 4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

#### **2.4.2 Implementasi Program Minapolitan**

Menurut Zulham (2010), berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (BBRSEPK), implementasi program minapolitan pada berbagai tipologi kelautan dan perikanan tersebut memerlukan tiga prinsip yaitu : pra-syarat minapolitan, model minapolitan dan road map minapolitan.

##### 1) Pra-syarat minapolitan

Prasyarat minapolitan adalah kondisi minimal yang harus dipenuhi pada suatu kawasan agar program minapolitan tersebut dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Prasyarat minapolitan tersebut terdiri dari :

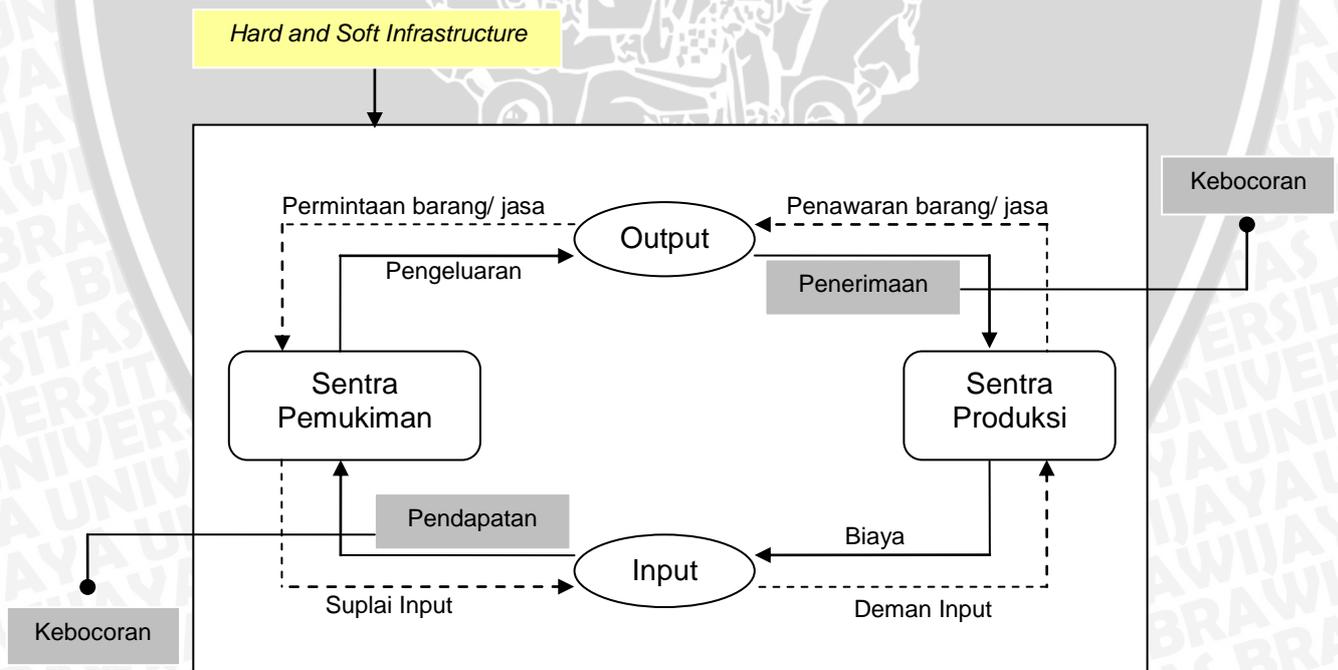
- a. Kawasan minapolitan tersebut tidak terisolasi
- b. Pemerintah daerah setempat memberi dukungan terhadap program minapolitan

- c. Memiliki potensi sumberdaya yang mencukupi
- d. Pendekatan dalam pengembangan komoditas perikanan berorientasi pada “*market driven*” bukan berdasarkan “*supply driven*”

## 2) Model minapolitan

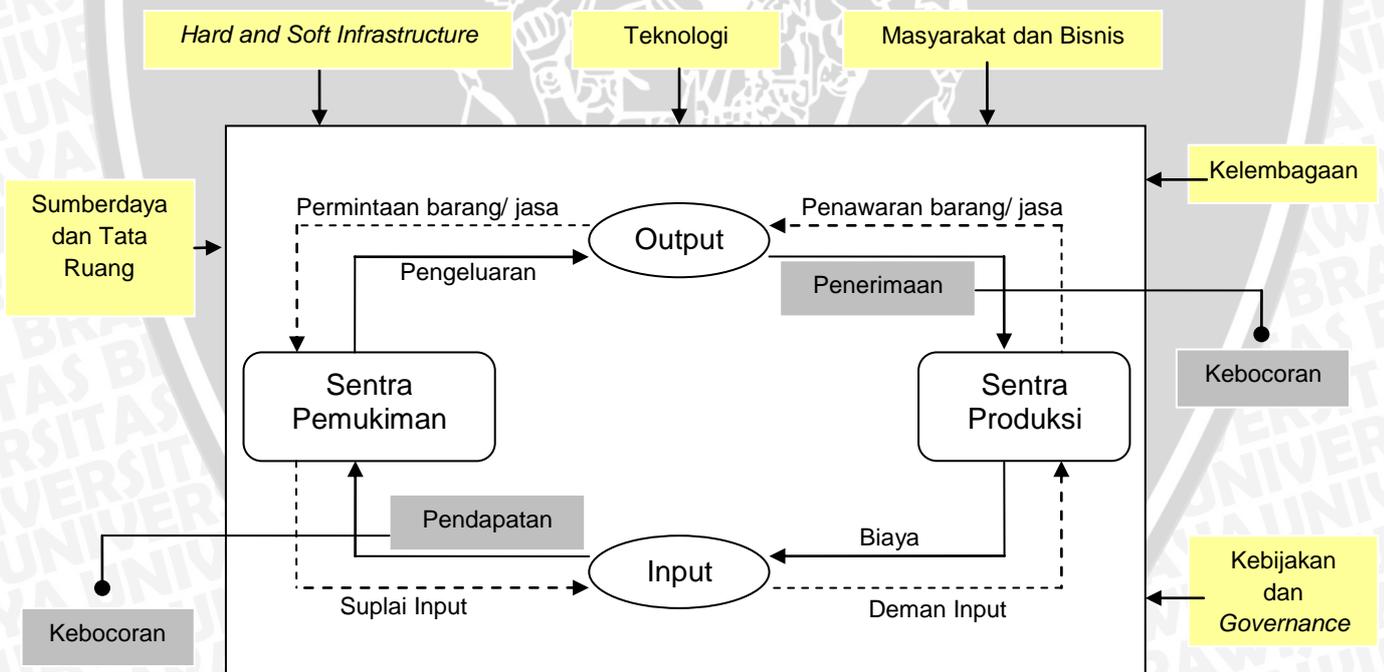
Ada tiga tahapan dalam membangun model minapolitan yaitu model eksisting, model konseptual dan model potensial serta model praktikal minapolitan

- a. Model eksisting, adalah rancangan model kajian minapolitan pada kawasan minapolitan yang dikembangkan oleh berbagai eselon 1 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada model ini pemerintah mengintervensi perekonomian kawasan dalam aspek *hard and soft infrastructure*. Model eksisting kajian minapolitan dapat dilihat pada gambar 1 :



Gambar 1. Model eksisting minapolitan

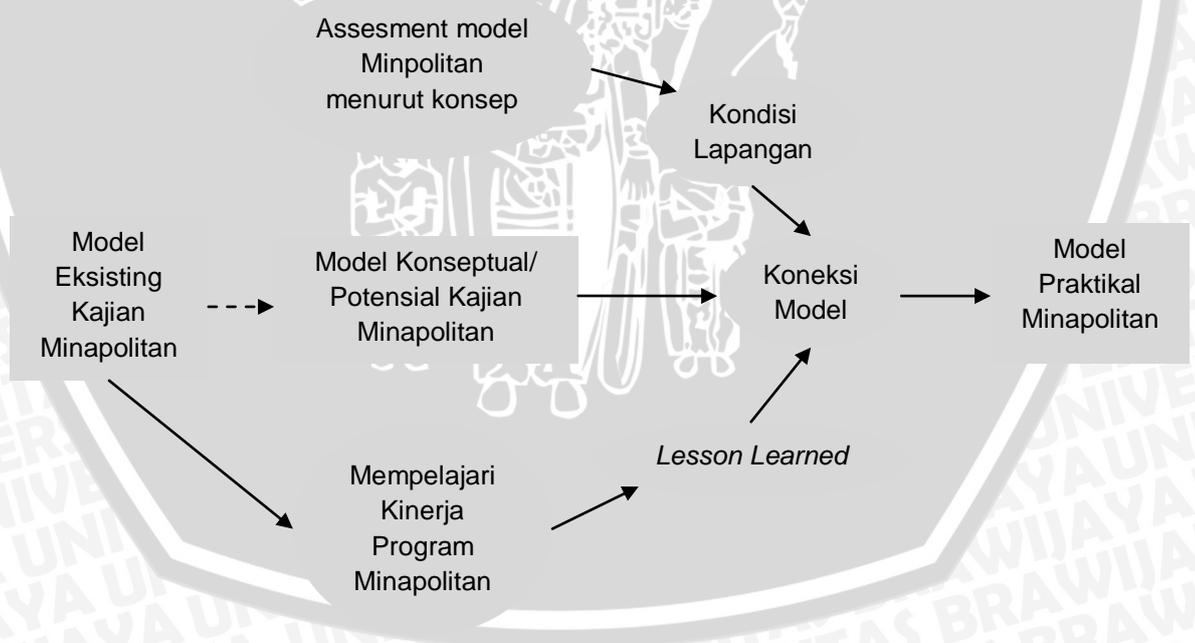
b. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan. Model eksisting kajian minapolitan yang dilengkapi dengan enam pilar minapolitan disebut sebagai model konseptual minapolitan. Model konseptual minapolitan adalah model yang dibangun pada kawasan minapolitan yang menjadi fokus untuk dipelajari dengan memperhatikan tujuan minapolitan. Sedangkan model potensial kajian minapolitan adalah model yang dibangun pada kawasan potensial pengembangan perikanan tetapi belum termasuk sebagai kawasan minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan ini mempunyai sumberdaya yang cukup dan akses pasar yang baik. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan

c. Model praktikal minapolitan, merupakan hasil komparasi antara model konseptual/ model potensial dengan kondisi dilapangan (model

eksisting). Komparasi ini akan menghasilkan *lesson learned* tentang kinerja program minapolitan pada lokasi penelitian berdasarkan variabel-variabel dari setiap pilar minapolitan. *Lesson learned* ini menjadi dasar untuk mengoreksi model minapolitan yang telah ada, sehingga diperoleh model praktikal minapolitan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, maka harus dilakukan assesmen terhadap model potensial kajian minapolitan terhadap kondisi spesifik lokasi penelitian. Assesmen ini menghasilkan pengetahuan spesifik lokasi yang menjadi dasar untuk mengoreksi model potensial kajian agar menjadi model praktikal minapolitan. Kerangka pendekatan menuju implementasi model minapolitan dapat dipelajari pada gambar 3 :



Gambar 3. Kerangka implementasi model praktikal minapolitan

### 3) *Road Map* Minapolitan

Model praktikal minapolitan yang dirumuskan harus dijabarkan dalam suatu *road map* minapolitan yang dapat memberi acuan dalam pelaksanaan program minapolitan. *Road map* tersebut sekurang-kurangnya memberikan acuan tentang tujuan dari program minapolitan tersebut (seperti peningkatan produksi dan kesejahteraan). Target peningkatan produksi per tahun, indikator kinerja tahunan dari program minapolitan, serta tahapan pelaksanaan program minapolitan pada suatu kawasan.

## 2.5 Pengembangan Kawasan Minapolitan

Program pengembangan kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan fasilitas oleh pemerintah (Pemda Kab. Lamongan, 2011).

### 2.5.1 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan :
2. Memiliki komoditas unggulan dibidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi

3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan
4. Terdapat unit produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi disuatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan/atau pemasaran yang saling terkait
5. Tersedia fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, saran dan prasarana produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan

### **2.5.2 Tata Laksana Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Sebagai kawasan ekonomi unggulan, kawasan minapolitan dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan paket-paket kebijakan lintas sektor dan daerah. Secara umum tata laksana pengembangan kawasan minapolitan mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

## 1. Perencanaan

Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan berdasarkan persyaratan kawasan minapolitan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Identifikasi keberadaan sentra produksi yang produktif dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui studi kelayakan
- b. Penetapan kawasan minapolitan dengan keputusan bupati/walikota
- c. Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan yang didalamnya mencakup rencana perusahaan dan rencana tindak
- d. Pengajuan rencana induk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri
- e. Proses perencanaan melibatkan para pihak yang terkait, yaitu unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan setelah ada kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan daerah yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan minapolitan merupakan fase lanjutan dari proses pembinaan dan pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan yang sedang berjalan
- b. Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan paket-paket kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- c. Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan sesuai dengan rencana induk dan kesepakatan antara pihak terkait pada fase perencanaan
- d. Perubahan rencana induk pada fase pelaksanaan dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersepakat sesuai perencanaan
- e. Penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana produksi, anggaran yang dapat bersumber dari APBD, APBN dan DAK sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait
- f. Penyiapan paket-paket pendampingan dan bantuan teknis, seperti paket pelatihan, penyuluhan dan teknologi oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya

### 3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, efektivitas dan efisiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta keberhasilan kegiatan dengan indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh bupati/walikota

### 4. Pelaporan

- a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur untuk selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, menteri/ pimpinan LPNK dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- b. Hasil analisis laporan disampaikan kepada bupati/walikota oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

### 2.5.3 Kelembagaan Minapolitan

Menurut KKP (2011), sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tentang Pedoman Umum Minapolitan secara umum kelembagaan Minapolitan di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Bupati/ Walikota
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Dinas kelautan dan Perikanan
4. Bidang Perencanaan : Kepala Bappeda
5. Bidang Pemberdayaan/Pelaksanaan : Kepala Pelabuhan Perikanan (perikanan tangkap) atau pihak lain yang mempunyai kompetensi (budidaya atau pengolahan)
6. Bidang Monitoring dan Evaluasi : Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang monitoring dan evaluasi atau pejabat lain yang ditunjuk
7. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

### 2.6 Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Anonymous, 2012).

Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan minapolitan ini harus didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, dan PP No. 25 Tahun 2000. Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/ kota maka Penanggungjawab Program Pengembangan

Kawasan Minapolitan adalah Bupati/ Walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah kabupaten/ kota adalah :

- a. Merumuskan program, kebijakan operasional, dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan
- b. Melibatkan dan mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses penyusunan masterplan, program dan melaksanakan program kawasan minapolitan
- c. Menumbuhkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, maka seluruh fungsi – fungsi manajemen pengembangan kawasan minapolitan meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) pada dasarnya dilakukan dan ditetapkan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/ kota. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang dilakukan secara demokratis. Pemerintah provinsi dan pusat berperan melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, agar kegiatan pengembangan kawasan minapolitan di lapangan berjalan lancar (Pemda Kab. Lamongan, 2011).

Menurut Kepmen Kelautan dan perikanan No.18 tentang Pedoman Umum Minapolitan Tahun 2011, komitmen pemerintah daerah berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan meliputi :

1. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah dan Nasional
2. Masuk ke dalam RPIJM
3. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
4. Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

5. Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah
6. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai
7. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat

## 2.7 Partisipasi Masyarakat

Arimbi (1993) dalam Bahagia (2009), mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok atau sebagai proses di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana didefinisikannya sebagai *feed forward information* (komunikasi dari Pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feed back information* (komunikasi dari masyarakat ke Pemerintah atas kebijakan). Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Sagrim (1997) dalam Bahagia (2009), menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) tipe partisipasi yang dapat terjadi dalam pembangunan di daerah. Kesembilan tipe partisipasi itu adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi tipe sukarela dengan inisiatif dari bawah.
- b. Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah.
- c. Partisipasi desakan atau paksaan (*enforced*) dengan inisiatif dari bawah.
- d. Partisipasi sukarela (*voluted*) dengan inisiatif dari atas.
- e. Partisipasi imbalan (*rewarded*) dengan inisiatif dari atas.
- f. Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas.
- g. Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (*through shared initiative*).
- h. Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama, dan

- i. Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama (dari atas dan dari bawah).

Pilihan kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang dimaksud terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilandasi oleh : pertama, partisipasi masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan merupakan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat pesisir akan lebih mempercayai program yang dikembangkan dalam bidang yang terkait langsung dengan kepentingan mereka. Keterlibatan mereka dalam proses persiapan dan perencanaan sampai implementasi membuat mereka mengetahui seluk-beluk program tersebut dan bahkan merasa memilikinya. Ketiga, hal ini akan mendorong terciptanya partisipasi secara umum (*common participation*) masyarakat pesisir dalam pembangunan karena tercipta persepsi yang kondusif bahwa partisipasi mereka merupakan "hak demokrasi" untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri (Kusumastanto, 2003).

## 2.8 Faktor Penghambat dan Pendukung Program

Faktor penghambat dan pendukung pada implementasi kebijakan menurut Wood dan Gun (1975) yaitu :

1. Faktor penghambat, antara lain :
  - a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
  - b. Kelemahan institusi
  - c. Ketidakmampuan sumberdaya manusia dibidang teknis maupun administrasi

- d. Kekurangan dalam bantuan teknis
  - e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
  - f. Sistem informasi yang kurang mendukung
  - g. Perbedaan agenda dan tujuan antara aktor
  - h. Dukungan yang berkesinambungan
2. Faktor pendukung, antara lain :
- a. Anggota masyarakat merespon terhadap otoritas-otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
  - b. Kesadaran untuk menerima kebijakan yang dibuat pemerintah
  - c. Keyakinan bahwa kebijakan itu memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan penting masyarakat

### **2.9 Hasil Penelitian Terdahulu**

Minapolitan merupakan konsep pembangunan wilayah yang memanfaatkan keunggulan wilayah. Keunggulan tersebut dapat berupa keunggulan lokasi dan komoditas. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) pada kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, persepsi pemerintah daerah terhadap minapolitan cenderung diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Minapolitan dianggap merupakan proyek pembangunan pemerintah pusat. Tujuan utama minapolitan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekayasa kelembagaan dalam mengakselerasi semua pilar minapolitan yang ada pada kawasan tersebut. Jika persepsi pengembangan minapolitan diarahkan pada salah satu pilar yang disebutkan sebelumnya, akan menyebabkan tidak terjadinya akselerasi peningkatan produksi perikanan (Zulham dkk, 2010).

Penerapan kebijakan minapolitan memerlukan strategi untuk melaksanakannya. Komponen – komponen pembangun minapolitan harus diidentifikasi dan diketahui bagaimana perannya pada kawasan tersebut. Jika inti minapolitan tersebut perannya dipercaya kepada pihak luar, maka pada kawasan minapolitan tersebut akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara pihak luar dengan komponen – komponen yang telah ada dalam kawasan minapolitan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pihak luar tersebut umumnya masuk ke kawasan minapolitan karena difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi mereka karena pihak luar tersebut mempunyai modal yang kuat, dengan harapan kehadiran mereka dapat berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi pada kawasan minapolitan.

Berdasarkan hasil penelitian BBRSEKP di PPN Ratu, pengamatan lapangan menunjukkan komponen – komponen yang berperan dalam membangun minapolitan berasal dari dalam kawasan minapolitan mempunyai banyak keterbatasan terkait dengan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan usaha. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kapasitas komponen – komponen tersebut diperlukan pendampingan teknis dan manajemen agar kapasitas dari komponen pembangunan minapolitan tersebut dapat meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian di kawasan minapolitan (Zulham dan Wardono, 2010).

Lebih lanjut Zulham dan Wardono (2010) menjelaskan, komponen – komponen yang berasal dari kawasan minapolitan harus berfungsi sebagai mitra strategis dari komponen yang berada dalam kawasan minapolitan. Mitra strategis tersebut dapat berperan sebagai penyuplai berbagai keperluan minapolitan melalui komponen – komponen lokal minapolitan, dan sebagai distributor hasil produksi yang dihasilkan kawasan minapolitan dengan mengikutsertakan komponen lokal. Membangun mitra strategis antara komponen lokal dengan

komponen lain diluar kawasan minapolitan adalah sangat sulit, karena itu diperlukan suatu pendekatan yang berkesinambungan agar terbentuk kepercayaan dan saling membutuhkan dalam kegiatan mereka dalam perekonomian.



### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Narbuko (2008), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data yang berupa kata-kata, tabel, gambar atau foto yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Data yang disajikan adalah deskripsi dari Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di kawasan PPN Brondong Kabupaten Lamongan, yaitu mulai dari profil, konsep perencanaan, proses implementasi, *stakeholder* yang terlibat, komitmen Pemerintah Daerah Lamongan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data di lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif, sampel yang diambil secara acak sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data kuantitatif dari indeks kesiapan Program Pengemabangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di PPN Brondong berdasarkan hasil observasi enam pilar minapolitan, juga tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam memahami, mengikuti dan mendukung pengembangan kawasan minapolitan melalui penyebaran kuesioner.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah obyek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena kawasan PPN Brondong merupakan salah satu kawasan yang dianggap memenuhi syarat untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan melalui Keputusan Menteri nomor 39 tahun 2011 telah ditetapkan sebagai kawasan program minapolitan berbasis perikanan tangkap. Dengan salah satu konsepsinya adalah menjadikan PPN Brondong sebagai *Mall* Perikanan. Hal ini menarik diteliti karena peneliti ingin mengetahui profil, indeks kesiapan, perencanaan, proses implementasi, komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dalam program tersebut serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan

program. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2012.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian dengan menentukan fokus penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, sehingga penelitian dilakukan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Sanapiah Faisal (1988) dalam Sugiyono (2011), mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Fokus pada penelitian ini adalah evaluasi terhadap profil, indeks kesiapan pelaksanaan minapolitan perikanan tangkap, konsistensi antara perencanaan dengan proses implementasi, komitmen Pemerintah Daerah Lamongan terhadap adanya program tersebut, partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman dan Akbar, 2009). Pada penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh nelayan dan segala kelengkapannya dalam kegiatan perikanan di Kecamatan Brondong.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul – betul representatif (Sugiyono, 2011). Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku usaha penangkapan atau nelayan yaitu pemilik kapal maupun Anak Buah Kapal (ABK).

### 3.5 Metode Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan *insidental sampling*.

Metode *purposive sampling* ini digunakan untuk mencari narasumber yang paham terkait program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan seperti pihak DKP Kabupaten Lamongan, Bappeda Kabupaten Lamongan, Dinas PPN Brondong, pelaku usaha perikanan, tokoh masyarakat nelayan, dan *stakeholder* lain yang terkait. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Sampel insidental ini digunakan untuk pengambilan sampel pada masyarakat nelayan untuk mengetahui tingkat partisipasi nelayan dalam

memahami, mengikuti dan mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong. Pengambilan sampel secara acak dimana setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Peneliti akan langsung mengumpulkan data dari unit sampel (nelayan) yang secara kebetulan atau tidak disengaja ditemui di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2011), sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Untuk penentuan jumlah sampel nelayan, peneliti menggunakan *Sample Linear Time Function*. Hal ini karena populasi nelayan tidak tetap dan nelayan anggota populasi sering tidak di tempat. Menurut Sari (1999) dalam Septiayuningtyas (2009), *Sample Linear Time Function* adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan estimasi kendala waktu. Besarnya jumlahnya sampel (n) yang diambil menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{T - t_0}{t_1}$$

Keterangan :

n = Banyaknya sampel yang terpilih

T = Waktu yang tersedia untuk penelitian (14 hari x 24 jam = 336 jam)

$t_0$  = Waktu tetap (12 jam/hari x 14 hari = 168)

$t_1$  = Waktu yang digunakan untuk sampling unit (0,25 x 14 hari = 3,5 jam)

Berikut perhitungan jumlah sampel yang diambil adalah :

$$\begin{aligned}n &= \frac{T - t_0}{t_1} \\n &= \frac{336 - 168}{3,5} \\&= \frac{168}{3,5} = 48 \text{ sampel}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus *Sample Linear Time Function* di atas, maka jumlah sampel nelayan yang diambil sebanyak 48 sampel.

### 3.6 Jenis dan Sumber Data

#### 3.6.1 Data Primer

Menurut Marzuki (2002), yang dimaksud data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dan pembagian angket (kuisisioner). Data primer yang ingin dikumpulkan antara lain :

1. Kondisi lokasi penelitian
2. Proses pelaksanaan program
3. Komitmen pemerintah daerah
4. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi maupun dengan pemerintah pusat
5. Tingkat partisipasi masyarakat nelayan
6. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program

### 3.6.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder, lebih lanjut Marzuki (2002) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan hasil dokumentasi. Data sekunder yang ingin dikumpulkan antara lain :

1. Master plan program yang berisi rencana induk, rencana perusahaan dan rencana tindak
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota
3. Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD)
4. Letak geografis dan topografi PPN Brondong serta wilayah Kabupaten Lamongan
5. Peta wilayah Kabupaten Lamongan
6. Jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat di Desa Brondong

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2011). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.7.1 Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2011), mendefinisikan interview sebagai berikut *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of*

*meaning about a particular topic*". Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer); pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman dan Akbar, 2009). Wawancara ini dapat dilakukan di kesempatan waktu pada saat penyebaran angket atau di waktu khusus/situasi tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan cara wawancara bebas terpimpin dengan menyiapkan daftar pedoman pertanyaan yang berisi uraian pertanyaan penelitian secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga diharapkan dalam proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data primer sesuai dengan fokus penelitian.

### 3.7.2 Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang

terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman dan Akbar, 2009).

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati kondisi lokasi penelitian dan pelaksanaan program saat penelitian.

### 3.7.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya (Usman dan Akbar, 2009). Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, Rencana Pengembangan Investasi

Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) serta peta geografi dan topografi PPN Brondong maupun wilayah Kabupaten Lamongan.

#### **3.7.4 Kuesioner**

Angket (kuesioner) ialah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Jenis angket tertutup mempunyai bentuk-bentuk pertanyaan seperti ya, tidak, pilihan ganda, skala penilaian dan daftar cek. Sedangkan jenis angket terbuka mempunyai bentuk pertanyaan berupa jawaban singkat atau uraian singkat (bentuk isian) (Usman dan Akbar, 2009).

Kuesioner ini tidak diberikan kepada responden untuk diisi sendiri, melainkan peneliti melakukan wawancara langsung untuk pengisian kuisisioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kuesioner yang tidak dikembalikan kepada peneliti dan dengan cara ini apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden, peneliti bisa langsung menjelaskan sampai responden dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk menggali data partisipasi nelayan.

#### **3.8 Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2011), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis

kualitatif dilakukan dengan cara deskripsi berupa uraian kata-kata maupun foto, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara *scoring*.

Berdasarkan pendapat diatas, maka tahap-tahap analisis yang dilakukan disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian :

- Untuk menjawab tujuan 1 :

Tujuan yang pertama yaitu mengetahui profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan maka dilakukan wawancara dengan *stakeholder*, dokumentasi dan observasi kondisi di kawasan minapolitan. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan berdasarkan enam pilar pembangunan minapolitan

- Untuk menjawab tujuan 2 :

Tujuan yang kedua yaitu menganalisis tingkat kesiapan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap, maka deskripsi profil yang sudah diperoleh pada tujuan 1 digunakan sebagai bahan acuan untuk memberikan skor atau nilai sehingga dapat diukur indeks kesiapannya. Sistematika pengukuran indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan dapat dilihat pada tabel 1. Dengan kriteria sebagai berikut :

0 – 50	Tidak siap melakukan program minapolitan
≥ 50 – 55	Siap melaksanakan program minapolitan dengan pembenahan infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, serta kebijakan
≥ 55 – 85	Siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan
≥ 85 – 100	Siap melaksanakan program minapolitan secara mandiri

Tabel 1. Indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
1. Infrastruktur		<b>20</b>			
	a. Fungsi dermaga pendaratan ikan	2	0 – 100		
	b. Keberadaan dan peran pabrik es	2	0 – 100		
	c. Persediaan pasokan listrik	2	0 – 100		
	d. Kondisi kolam pelabuhan	3	0 – 100		
	e. Kecukupan pasokan BBM	2	0 – 100		
	f. Ketersediaan pasokan air bersih	2	0 – 100		
	g. Kondisi jalan raya				
	h. Kondisi transportasi dan logistik	2	0 – 100		
	i. Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan	2	0 – 100		
		3	0 – 100		
2. Masyarakat dan bisnis		<b>20</b>			
	a. Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	5	0 – 100		
	b. Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan	5	0 – 100		
	c. Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan	5	0 – 100		
	d. Kemampuan penduduk lokal memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan	5	0 – 100		

Lanjutan dari tabel 1.

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
3. Sumberdaya dan tata ruang	a. Ketersediaan dokumen RTRW	5	0 – 100		
	b. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan	5	0 – 100		
	c. Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan	5	0 – 100		
	<b>4. kelembagaan</b>				
4. kelembagaan	a. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan minapolitan	4	0 – 100		
	b. SK Bupati/Walikota tentang kelompok kerja pengelolaan kawasan minapolitan	4	0 – 100		
	c. Persepsi kelembagaan formal tentang minapolitan	4	0 – 100		
	d. Persepsi masyarakat tentang minapolitan	3	0 – 100		
5. Teknologi	a. Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	5	0 – 100		
	b. Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengolahan ikan	5	0 – 100		
	c. Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan	5	0 – 100		

Lanjutan dari tabel 1.

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
6.Kebijakan dan Governance	a. Persepsi pemda tentang minapolitan	5	0 – 100		
	b. Komitmen pemda tentang minapolitan	5	0 – 100		
	c. Strategi implementasi model minapolitan	5	0 – 100		
	<b>Total Nilai</b>		<b>100</b>		

Keterangan :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor}}{\text{batasan skor}} \times \text{bobot}$$

- Untuk menjawab tujuan 3 :

Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi konsistensi antara perencanaan dan proses implementasi program minapolitan perikanan tangkap di kawasan PPN Brondong maka dilakukan wawancara dengan *stakeholder*, observasi pelaksanaan kegiatan program yang sedang berlangsung saat penelitian, serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan yaitu tentang rencana induk, rencana perusahaan, rencana tindak, jadwal dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah mencakup variabel-variabel yang terdapat dalam tabel 2.

Tabel 2. Data masing-masing variabel terhadap perencanaan dan pelaksanaan program

No	Variabel	Keterangan
1	Perencanaan program	Sesuai/tidak dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
2	Pelaksanaan	Sesuai/tidak dengan perencanaan program
3	Proses jalannya program	Bagaimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana (sejauh mana program masih tetap berjalan)
4	Hasil pelaksanaan	Apakah dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang dicapai
5	Waktu pelaksanaan	Sesuai/ tidak dengan waktu yang telah ditargetkan/ditentukan

- Untuk menjawab tujuan 4 :

Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong, dilakukan wawancara dengan pihak Pemda Lamongan terkait alokasi APBD, rencana tata ruang, RPIJMD, sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tim POKJA, serta dukungan pemerintah terkait penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang program tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

- Untuk menjawab tujuan 5 :

Tujuan yang kelima yaitu tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami, mengikuti dan menudukung keberhasilan program minapolitam perikanan tangkap di PPN Brondong, dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada nelayan, baik nelayan pemilik kapal maupun ABK. Dari angket yang telah disebar kemudian dilakukan penilaian berdasarkan skor yang sudah ditentukan pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )
1.	Pertanyaan 1	1	0
2.	Pertanyaan 2	1	0
3.	Pertanyaan 3	1	0
4.	Pertanyaan 4	1	0
5.	Pertanyaan 5	1	0
6.	Pertanyaan 6	1	0
7.	Pertanyaan 7	1	0

Tabel 4. Partisipasi nelayan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )
1.	Partisipasi nelayan dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia		
	Pertanyaan 1	1	0
	Pertanyaan 2	1	0
	Pertanyaan 3	1	0
	Pertanyaan 4	1	0
	Pertanyaan 5	1	0
	Pertanyaan 6	1	0
	Pertanyaan 7	1	0
2.	Partisipasi masyarakat melalui aktif di kegiatan organisasi		
	Pertanyaan 1	1	0
	Pertanyaan 2	1	0
	Pertanyaan 3	1	0
	Pertanyaan 4	1	0
	Pertanyaan 5	1	0
3.	Partisipasi masyarakat dalam mematuhi tata tertib		
	Pertanyaan 1	1	0
	Pertanyaan 2	1	0
	Pertanyaan 3	1	0
	Pertanyaan 4	1	0
	Pertanyaan 5	1	0
4.	Kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi		
	Pertanyaan 1	1	0
	Pertanyaan 2	1	0
	Pertanyaan 3	1	0
	Pertanyaan 4	1	0

Keterangan :

$$\% \text{ partisipasi} = \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \%$$

Dari skor yang telah diperoleh kemudian di persentase untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu juga dilakukan observasi terhadap nelayan yang ada di lingkungan pelabuhan.

- Untuk menjawab tujuan 6 :

Hasil dari semua penggalan data baik melalui wawancara, observasi maupun penyebaran angket akan digunakan untuk menjawab tujuan yang terakhir yaitu terkait faktor-faktor penghambat dan pendukung program. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

### 3.8 Kerangka Berpikir

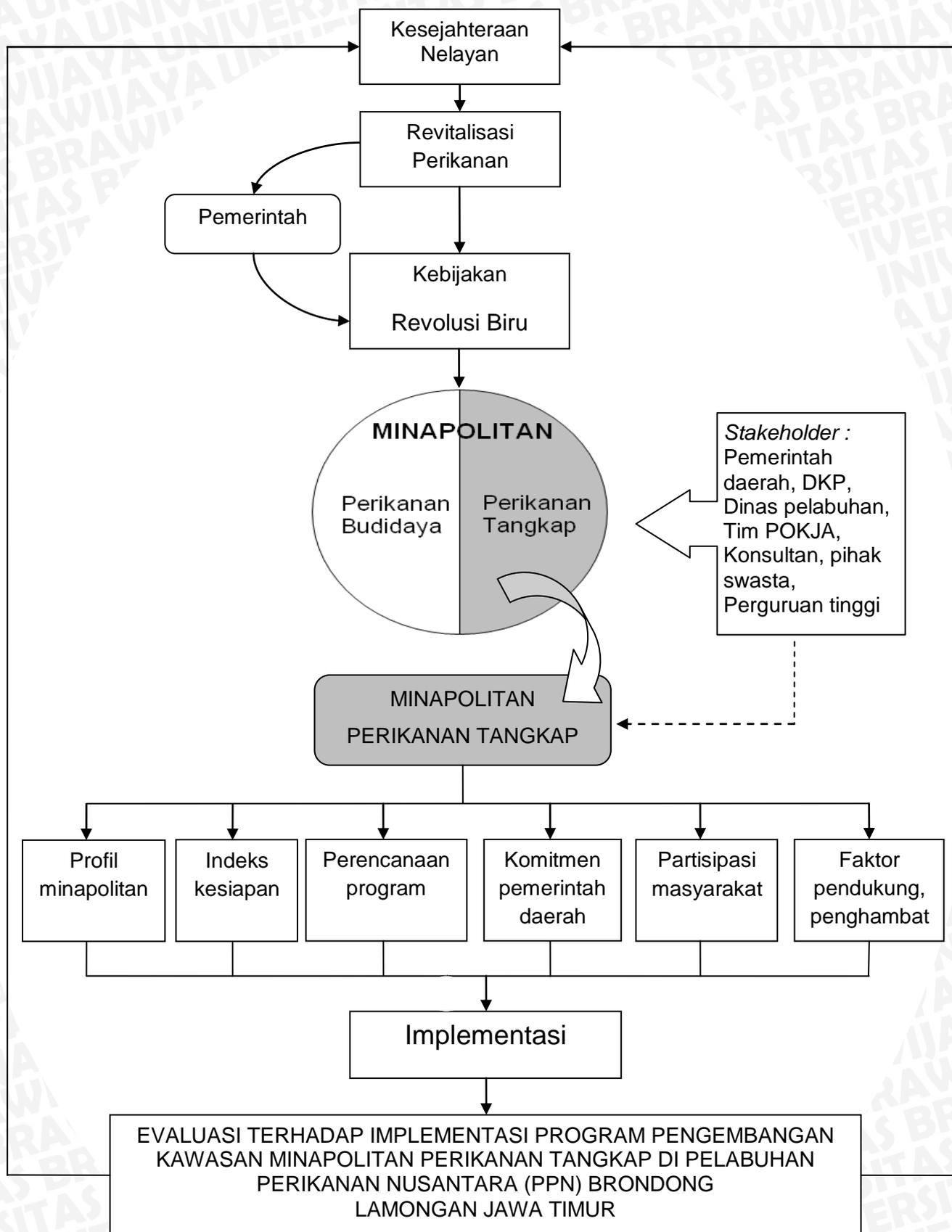
Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tujuan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Penyusunan kerangka berpikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan kesimpulan. Kesimpulan inilah yang menjadi rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah penelitian kita (Usman dan Akbar, 2009).

Permasalahan kesejahteraan masyarakat nelayan merupakan permasalahan yang kompleks. Berbagai program kebijakan revitalisasi perikanan terus dijalankan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. Namun kenyataannya, program-program kebijakan terdahulu yang sering dilaksanakan secara sektoral dirasakan belum

memberikan manfaat yang optimal. Target dari tujuan yang telah ditetapkan seringkali tidak tercapai.

Sebuah kebijakan terobosan Revolusi Biru yang direalisasikan lewat program minapolitan akan dijalankan secara multi sektoral. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan, terutama komitmen pemerintah daerah serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Melihat kondisi sumberdaya perikanan saat ini serta perkembangan teknologi dan kualitas SDM yang masih rendah, maka minapolitan merupakan megaproyek yang dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait. Faktor pendukung dan penghambat program perlu dianalisis untuk mencegah kegagalan program.

Salah satu daerah yang telah ditetapkan oleh KKP sebagai kawasan minapolitan adalah Kabupaten Lamongan dengan basis perikanan tangkap dan budidaya. Pada penelitian ini pembahasan dibatasi hanya pada minapolitan perikanan tangkap dengan pusat pengelolaan minapolitan pada PPN Brondong. Maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur" untuk menjawab apakah pelaksanaan program tersebut sudah mencapai sasaran dan tujuan program tanpa ada tindakan penyelewengan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Kerangka berpikir

## 4. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

#### 4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada  $6^{\circ} 51' 54''$  sampai dengan  $7^{\circ} 23' 6''$  Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur  $122^{\circ} 4' 4''$  sampai  $122^{\circ} 33' 12''$ . Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah  $\pm 1.812,8 \text{ km}^2$  atau  $\pm 3,78 \%$  dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas  $902,4 \text{ km}^2$ , apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Laut Jawa
Sebelah timur	: Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan	: Kabupaten Jombang dan Mojokerto
Sebelah Barat	: Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 474 desa/ kelurahan (426 desa dan 12 kelurahan). Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lamongan meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong. Peta Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 4.1.2 Keadaan Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah diatas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan berawa dengan tingkat ketinggian 0-25 m seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 m seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 m di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng. Sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

#### 4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebanyak 1.305.898 jiwa, dengan jumlah pencari kerja sebanyak 1.706 orang. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain maka Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran termasuk dalam kategori wilayah yang padat penduduk yaitu 57.205 jiwa dan 78.698 jiwa. Data jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.

#### 4.1.4 Potensi Perikanan Tangkap

Dengan panjang pantai yang mencapai 47 km<sup>2</sup>, Kabupaten Lamongan mempunyai potensi perikanan laut yang cukup menjanjikan. Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan Laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 Tempat

Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat (Weru, Kranji, Brondong, Labuhan dan Lohgung). Dilihat dari produksinya paling tinggi adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mencapai  $\pm$  100 ton/hari, dibandingkan dengan keempat pangkalan pendaratan ikan yang lain yaitu Weru, Kranji, Labuhan dan Lohgung yang hanya mencapai 10 ton/hari.

Tabel 5. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukorame	10.797	11.057	21.854
2.	Bluluk	11.099	11.596	22.695
3.	Ngimbang	21.239	21.633	42.872
4.	Sambeng	28.006	26.712	54.718
5.	Mantup	21.655	22.032	43.687
6.	Kembangbahu	21.769	22.990	44.759
7.	Sugio	29.933	30.832	60.765
8.	Kedungpring	31.925	33.906	65.831
9.	Modo	23.572	24.535	48.107
10.	Babat	41.965	43.220	85.185
11.	Pucuk	25.000	26.267	51.267
12.	Sukodadi	28.652	29.494	58.146
13.	Lamongan	32.022	33.825	65.847
14.	Tikung	20.304	21.038	41.342
15.	Sarirejo	12.526	13.007	25.533
16.	Deket	22.139	22.315	44.454
17.	Glagah	16.380	10.871	27.251
18.	Karangbinangun	22.748	22.980	45.728
19.	Turi	25.986	27.158	53.144
20.	Kalitengah	17.401	17.932	35.333
21.	Karanggeneng	23.416	24.244	47.660
22.	Sekaran	30.118	30.135	60.253
23.	Maduran	20.119	21.808	41.927
24.	Laren	17.168	20.100	37.268
25.	Solokuro	21.515	22.854	44.369
26.	Paciran	38.352	40.346	78.698
27.	Brondong	27.456	29.749	57.205
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>643.262</b>	<b>662.636</b>	<b>1.305.898</b>

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2012

Secara umum produksi hasil tangkapan perikanan di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut Utara Jawa Timur sebagai berikut :

1. Produksi ikan permukaan didominasi oleh jenis ikan layang, yaitu mencapai 24,48%, produksi ikan dasar didominasi oleh ikan kuniran sebesar 20,55%, produksi ikan karang didominasi oleh ikan bambangan sebesar 3,52%, produksi cumi-cumi sangat rendah yaitu sebesar 0,74%, begitu pula untuk produksi udang yang mencapai 0,28%.
2. Komposisi produksi ikan-ikan permukaan (pelagis) mencapai 51,14 yang tidak jauh beda dengan produksi ikan dasar (demersal), sehingga katifitas dan lapangan kerja usaha perikanan pelagis dan demersal di perairan Laut Jawa keduanya memegang peranan penting terhadap perolehan produksi ikan, lapangan kerja dan pendapatan nelayan.
3. Dengan tersedianya bahan baku industri, dari jenis ikan yang cukup sekalipun relatif bervariasi, maka perikanan laut di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut Utara Jawa Timur menunjukkan tipe perikanan multi spesies yang sebenarnya.

#### 4.2 Gambaran Umum Daerah Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan dikembangkan dalam struktur kewilayahan meliputi Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis), dengan PPN Brondong sebagai Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM). Sebagai kawasan pendukung minapolis, dilihat dari potensi yang ada maka ditetapkan Kecamatan Paciran sebagai *hinterland*. Kecamatan Paciran ditunjuk sebagai kawasan *hinterland* karena selain lokasinya bersebelahan dengan Kecamatan Brondong dan memiliki potensi perikanan, Kecamatan Paciran merupakan pusat pariwisata di Kabupaten Lamongan.

#### 4.2.1 Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di belahan utara. Wilayah Kecamatan Brondong yang meliputi areal seluas 7.013,62 Ha atau 70.13 km<sup>2</sup>, ± 50 km dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Wilayah Kecamatan Brondong terdiri atas 9 desa 1 kelurahan, 22 dusun 2 lingkungan kelurahan, 57 RW 266 RT dan 11.949 KK. Kecamatan ini berada pada koordinat antara 06° 53' 30,81" – 7° 23' 6" Lintang Selatan dan 112° 17' 01,22" – 112° 33' 12" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kecamatan Paciran

Sebelah selatan : Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro

Sebelah barat : Kecamatan Palang Tuban

Dilihat dari keadaan geografisnya, maka Kecamatan Brondong dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Daerah pantai terletak disebelah utara meliputi Kelurahan Brondong, Desa Sedayulawas, Desa Labuhan dan Desa Lohgung. Di daerah ini sangat cocok untuk budidaya ikan (tambak udang, ikan kerapu dan bandeng) serta usaha penangkapan ikan di laut. Terdapat usaha budidaya dengan areal tambak seluas 1.280,4 ha. Mencakup areal budidaya udang vaname 66 ha (operasional), bandeng 574 ha, kerapu 75 ha, tambak garam 228 ha, dan sisanya tambak mangkrak (*idle*) dengan jumlah RTP 41 orang. Di kecamatan ini terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Sehingga pada daerah tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah daerah kawasan pertanian yang meliputi Desa Sumberagung, Desa Sendangharjo, Desa Lembor, Desa Tlogoretno, Desa Sidomukti dan Desa Brengkok, dengan kondisi pertanian tadah hujan.

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Brondong sampai akhir bulan april 2012 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 57.344 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27.515 jiwa dan perempuan sebanyak 29.829 jiwa. Data jumlah penduduk masing-masing desa/ kelurahan di Kecamatan Brondong sebagai berikut :

Tabel 6. Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Brondong

No.	Desa	Luas Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan/ Km <sup>2</sup>
1.	Brondong	2,34	10.559	3.652	4.215
2.	Sumberagung	4,16	2.462	1.161	567
3.	Sedayulawas	10,64	11.881	4.054	1.055
4.	Sendangharjo	7,44	5.183	1.837	669
5.	Lembor	16,07	2.475	1.027	144
6.	Tlogoretno	3,48	1.341	775	348
7.	Brengkok	10,57	10.004	3.399	864
8.	Labuhan	6,43	6.708	1.819	1.028
9.	Sidomukti	6,09	3.864	2.287	606
10	Lohgung	2,91	2.867	1.137	869
<b>Jumlah</b>		<b>70,13</b>	<b>57.344</b>	<b>21.148</b>	<b>769</b>

Sumber : Data Statistik dan Profil Kecamatan Brondong Tahun 2012

Jumlah penduduk usia dewasa di wilayah Kecamatan Brondong mencapai 32.693 jiwa, memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam diantaranya :

Tabel 7. Jumlah penduduk Kecamatan Brondong berdasarkan mata pencaharian

No.	Desa	Petani	Dagang	Nelayan	Pegawai Negeri	Lainnya
1.	Brondong	257	778	4.436	56	480
2.	Sumberagung	885	84	231	7	73
3.	Sedayulawas	2.625	942	2.503	89	551
4.	Sendangharjo	3.106	37	252	22	96
5.	Lembor	1.080	21	52	5	67
6.	Tlogoretno	682	12	26	3	82
7.	Brengkok	4.820	89	426	12	307
8.	Labuhan	82	698	2.325	11	516
9.	Sidomukti	2020	69	62	9	106
10.	Lohgung	75	56	1.364	7	97
<b>Jumlah</b>		<b>15.632</b>	<b>2.786</b>	<b>11.677</b>	<b>223</b>	<b>2.375</b>

Sumber : Data Statistik dan Profil Kecamatan Brondong Tahun 2012

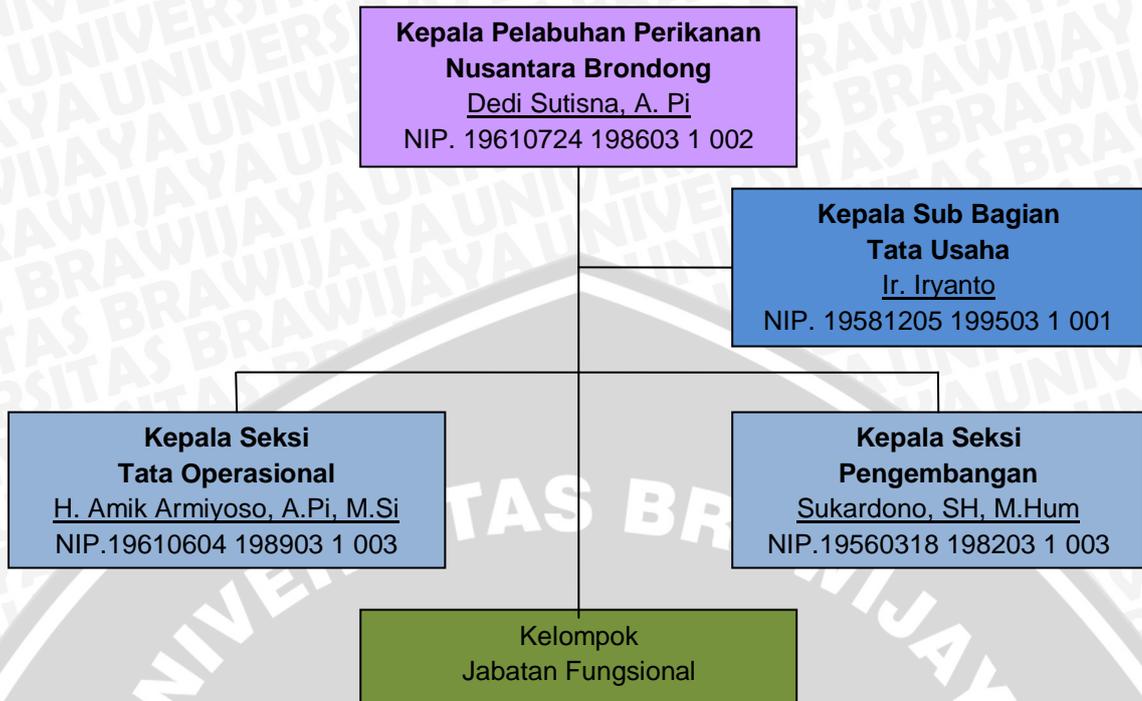
#### 4.2.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Bedasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi pelabuhan perikanan Brondong ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) sampai saat ini. PPN Brondong sebagai titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat telah terbukti mampu melakukan revitalisasi terhadap fungsi dan peranannya sehingga menjadikannya sebagai "*Centre of Excellence*" bagi pengembangan perikanan tangkap serta sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengolahan hasil perikanan.

Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan posisi koordinat secara geografis pada  $06^{\circ} 53' 30,81''$  LS dan  $112^{\circ} 17' 01,22''$  BT. Sebagai basis utama perikanan laut di wilayah utara Jawa Timur karena daerah tangkapnya (*fishing ground*) adalah laut utara jawa yang menjangkau perairan laut lepas pantai yang sangat potensial dengan beragam jenis ikan baik pelagis maupun demersal, PPN Brondong dapat menstabilkan harga ikan sebagai pemicu dalam menarik minat nelayan daerah lain untuk memasarkan ikannya.

##### a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER. 06/MEN/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, maka ditindaklanjuti dengan menyusun struktur organisasi PPN Brondong seperti gambar 5.



Gambar 5. Struktur Organisasi PPN Brondong

Jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 75 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 8. Daftar pegawai pelabuhan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Golongan / Status						Jumlah
		IV	III	II	I	CPNS	Tenaga Kontrak	
1.	S2 Adm. Publik	1	-	-	-	-	-	1
2.	S2 Ilmu Hukum	1	-	-	-	-	-	1
3.	Sarjana/DIV Perikanan	1	14	-	-	5	-	20
4.	Sarjana Ekonomi	-	7	-	-	-	-	7
5.	D III Perikanan	-	-	2	-	-	-	2
6.	D III Akuntansi	-	-	1	-	-	-	1
7.	SLTA	-	7	20	-	-	6	33
8.	SUPM	-	-	1	-	1	2	4
9.	SLTP	-	-	-	4	-	1	5
	SD	-	-	1	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>75</b>

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

b. Pemanfaatan Sarana dan Prasaran

Luas lahan pelabuhan perikanan sebesar 106.342 m<sup>2</sup> dengan rincian luas lahan pelabuhan lama sebesar 18.524 m<sup>2</sup> dan luas lahan pelabuhan baru sebesar 87.818 m<sup>2</sup>.

Tabel 9. Pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelabuhan

No.	Jenis Fasilitas	Luas	
		lahan	Bangunan
1	Dermaga / jetty		161 m, 364,5 m
2	Kolam pelabuhan	23,4 Ha	
3	Turap (Revetment)	2.139 m	
4	Jalan komplek	2000 m	
5	Breakwter		292 m
6	Tempat ibadah		100 m <sup>2</sup>
7	Pagar keliling		380 m
8	Tendon air tawar		276 m <sup>2</sup>
9	Tendon air laut		122,97 m <sup>2</sup>
10	Pos jaga		24 m <sup>2</sup>
11	Gedung PPDI		5.595 m <sup>2</sup>
12	Bengkel pelabuhan		27,6 m <sup>2</sup>
13	Gedung pabrik es		54 m <sup>2</sup>
14	Gedung informasi		63 m <sup>2</sup>
15	Gedung UBPT		54 m <sup>2</sup>

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 10. Pemanfaatan lahan oleh pihak umum

No.	Jenis Fasilitas	Luas	Pihak Yang Memanfaatkan
1	Lahan tanah	1.000 m <sup>2</sup>	Kios (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
2	Gedung bangunan	48 m <sup>2</sup>	Kantor PT. Jamsostek (disewa pihak ke-3 PT. Jamsostek)
3	Gedung bangunan	18 m <sup>2</sup>	MCK (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
4	Lahan tanah	29 m <sup>2</sup>	Gudang es curah (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
5	Gedung bangunan	47 m <sup>2</sup>	MCK (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
6	Lahan tanah	700 m <sup>2</sup>	Tempat penanganan, pengolahan, dan penampungan ikan (Dinas Kelautan Perikanan)

Lanjutan dari tabel 10.

No	Jenis Fasilitas	Luas	Pihak Yang Memanfaatkan
7	Bangunan semi permanen	348 m <sup>2</sup>	Tempat penanganan, pengolahan, dan penampungan ikan (KPRI Nusantara Jaya)
8	Bangunan gedung	58 m <sup>2</sup>	Kantor BPR Jatim Cb. Lamongan (BPR Jatim Cab. Lamongan)
9	Bangunan semi permanene	24 m <sup>2</sup>	Kios
10	Lahan tanah	8.106 m <sup>2</sup>	Disewa oleh pihak ke-2 (PT. Bintang Timur Samudera)
11	Lahan tanah	4000 m <sup>2</sup>	Disesa oleh pihak ke-3 (PT. Alam Jaya)

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Sisa lahan pelabuhan baru sebesar 69.694,03 m<sup>2</sup> dan digunakan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan serta area industri yang akan disewakan ke pihak ke-3

#### c. Fasilitas yang Tersedia di Kawasan Pelabuhan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

Tabel 11. Fasilitas Pokok PPN Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Areal pelabuhan	2,59 Ha	Perum PPNBr I ( <i>Full Capacity</i> )
	Lahan industri	1,85 Ha	
	Lahan industri	8,78 Ha	
2.	Dermaga/ jetty	161 m	PPNBr I
		364,5 m	PPNBr II
3.	Kolam pelabuhan	23,4 Ha	PPNBr
4.	Turap (revetment)	2.139 m	PPNBr
5.	Jalan kompleks	2000 m	PPNBr
6.	Breakwater	292 m	PPNBr

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 12. Fasilitas penunjang PPN Brondong

No.	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Tempat ibadah	100 m <sup>2</sup>	PPNBr
2.	Pagar keliling	380 m	PPNBr
3.	Mess operator	250 m <sup>2</sup>	Perum
4.	Rumah kalubuh	120 m <sup>2</sup>	Perum
5.	Rumah dinas	170 m <sup>2</sup>	Perum
6.	Kios/ warung	250 m <sup>2</sup>	Perum

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 13. Fasilitas fungsional PPN Brondong

No.	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Gedung TPI	1080 m <sup>2</sup>	Perum
2.	Gudang keranjang	100 m <sup>2</sup>	Perum
3.	Shelter nelayan	100 m <sup>2</sup>	Perum
4.	Tangki air dan instalasi	170 m <sup>3</sup>	Perum
5.	Tangki BBM	150 ton, 25 ton	Perum
6.	Listrik dan instalasi	345 KVA	Perum
7.	Genset dan instalasi	170 KVA	Perum
8.	Tempat penjualan BBM	36 m <sup>2</sup>	Perum
9.	Bengkel	120 m <sup>2</sup>	Perum
10.	Kantor Perum	200 m <sup>2</sup>	Perum
11.	Pabrik es balok	15 & 50 ton/hari	Perum
12.	Pabrik es curai	-	Perum (rusak)
13.	Ruang pengepakan ikan	240 m <sup>2</sup>	Perum
14.	Areal parkir	800 m <sup>2</sup>	Perum
15.	Ruang sortir ikan	120 m <sup>2</sup>	Perum
16.	Rumah genset	60 m <sup>2</sup>	Perum
17.	Tower air	1 unit	Perum
18.	BPN	125 m <sup>2</sup>	PPNBr I
19.	Pos masuk	25 m <sup>2</sup>	PPNBr I
20.	Kantor pelabuhan	348 m <sup>2</sup>	PPNBr I
21.	Los pengepakan ikan	180 m <sup>2</sup>	PPNBr I
22.	MCK	60 m <sup>2</sup>	PPNBr I
23.	Los pem. Kep. Ikan	300 m <sup>2</sup>	PPNBr I
24.	Refer container	1 unit	PPNBr I
25.	Rambu navigasi	4 buah	PPNBr I
26.	Pabrik es mini	1 unit	PPNBr I
27.	Seawater treatment	1 unit	PPNBr I
28.	Gedung UBPT	12,9 m <sup>2</sup>	PPNBr I
29.	Gedung WASDI	1 unit	PPNBr I
30.	Bengkel pelabuhan	27,6 m <sup>2</sup>	PPNBr I
31.	Pos satpam	18 m <sup>2</sup>	PPNBr I
32.	Area bongkar muat	960 m <sup>2</sup>	PPNBr I
33.	Pos jaga	24 m <sup>2</sup>	PPNBr II*
34.	Sea water tank	1 unit	PPNBr II*
35.	Gedung pelelangan	2.976 m <sup>2</sup>	PPNBr II*
36.	Ruang sortir ikan	744 m <sup>2</sup>	PPNBr II*
37.	Kantor administratur	96 m <sup>2</sup>	PPNBr II*
38.	Ruang pembongkaran	769 m <sup>2</sup>	PPNBr II*
39.	Tandon air tawar	1 unit	PPNBr II*
40.	Jaringan listrik	240 KVA	PPNBr II*

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

## d. Keragaan Operasional

Rekapitulasi kegiatan operasional di PPN Brondong sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Kegiatan operasional di PPN Brondong

No	Kegiatan	Sat	2007	2008	2009	2010	2011
1	Produksi Ikan	Ton	60.769	52.249	57.198	46.432	49.278
2	Kunjungan Kapal	Kapal	24.379	22.327	25.573	19.681	13.769
3	Nilai Produksi Ikan	Milyar	421,8	442,32	495,41	437,82	511,79
4	Penyaluran Perbekalan						
	a. Penyaluran Es	Ton	54.031	56.602	57.625	59.378	50.209
	b. Penyaluran Air	M3	94.530	22.638	28.211	27.738	26.818
	c. PenyaluranBBM	Ton	26.817	1.250	3.800	6.074	6.360
5	Pendapatan Pelabuhan	Juta	11.955,31	19.123,83	29.132,31	38.626,10	40.668,63
	a. PNBP	Juta	43,96	75,83	118,15	146,80	281,95
	b. Pendapatan Perum	Juta	11.020,35	18.091,5	28.162,92	37.734,34	39.625,91
	c. Jasa Retribusi Lelang	Juta	891	957	851,24	744,96	760,77
6	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	Orang	15.537	15.239	15.460	14.800	14.418
7	Jumlah Nelayan	Orang	14.101	13.667	13.997	13.337	12.955
8	Jumlah Kapal Ikan	Unit	1.525	1.528	1.546	1.520	1.436
9	Jumlah Alat Tangkap	Unit	1.525	1.528	1.466	1.440	1.348
10	Jumlah Uang yg Beredar	Milyar	448,50	476,56	540,31	495,14	572,62

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

## e. Instansi Terkait

Berdasarkan pada KEPMENTAN No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang tata hubungan kerja UPT pelabuhan perikanan dengan instansi terkait, maka PPN Brondong banyak bekerjasama dengan instansi yang mempunyai sektor terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menciptakan kondisi pelabuhan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yaitu bekerjasama dengan Pengawas Sumberdaya Ikan, Perum PPS Cabang Brondong, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), KUD Mina Tani, Puskesmas, Bank Swamitra Mina, Unit Usaha Kecil, Jamsostek, TPI Labuhan Tengah, TPI Labuhan Barat, TPI Labuhan Timur, TPI Weru, TPI Kranji dan TPI Brondong.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Profil Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan

#### 5.1.1 Visi dan Misi

Visi kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya minapolis yang memiliki daya saing dengan dukungan pemanfaatan sumberdaya laut berbasis lingkungan. Sedangkan misi dari kawasan minapolitan adalah :

1. Mengembangkan sektor perekonomian berbasis rakyat dengan komoditas bidang perikanan tangkap
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan guna mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Lamongan
3. Meningkatkan pelayanan pengembangan keterampilan teknis kepada para nelayan
4. Penggunaan teknologi penangkapan yang tepat guna
5. Mendayagunakan serta menjaga kelestarian sumberdaya alam
6. Mendorong berkembangnya industri perikanan dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan

Secara umum minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di pusat kegiatan (minapolis) dan kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*).

### 5.1.2 Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*.

Kecamatan Brondong ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena dilihat dari tingginya potensi perikanan yang dimiliki, serta terdapat PPN Brondong dan TPI Brondong yang merupakan tempat pendaratan ikan terbesar di Kabupaten Lamongan. Sedangkan Kecamatan Paciran ditetapkan sebagai kawasan *hinterland* selain karena potensi perikananannya juga daerah tersebut merupakan pusat pariwisata di Kabupaten Lamongan sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian dari kawasan minapolis.

### 5.1.3 Komoditas Unggulan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka ditetapkan juga komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan karena produksinya yang banyak dan stabil serta memiliki permintaan pasar yang tinggi. Secara lebih jelas ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran dapat dilihat pada gambar 6.



( a )



( b )



( c )



( d )

Gambar 6. ( a ) ikan tongkol, ( b ) ikan layang, ( c ) ikan Kembung, dan ( c ) ikan kuniran

#### 5.1.4 Pengelolah Minapolitan

Berdasarkan Surat Keputusan bupati Nomor : 188/199/Kep/413.013/2011, tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202.1/Kep/413.013/2010, Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, maka dibentuk tim POKJA (Kelompok Kerja) seperti yang terlihat pada tabel 15.

Tabel 15. Susunan tim POKJA minapolitan Kabupaten Lamongan

No	Jabatan dalam kelompok	Keterangan
1.	Penanggung jawab 1	Bupati Lamongan
2.	Penanggung jawab 2	Wakil Bupati Lamongan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan
5.	Bidang perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

Lanjutan tabel 15

No	Jabatan dalam kelompok	Keterangan
6.	Bidang pemberdayaan/ pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan</li> <li>2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan</li> <li>3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan</li> </ol>
7.	Bidang monitoring/ evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> </ol>
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan</li> <li>2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan</li> <li>3. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan</li> <li>4. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan</li> <li>5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan</li> <li>6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>8. Kepala Unit Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan</li> <li>9. Camat Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan</li> <li>10. Kepala UPT Perikanan dan Kelautan Kecamatan Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lamongan</li> </ol>

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan

## 5.2 Tingkat Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan

Tingkat kesiapan pelaksanaan minapolitan dapat diukur berdasarkan hasil perhitungan indeks yang mengacu pada enam pilar minapolitan. Oleh karena itu

sebelum menghitung nilai indeksnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui gambaran dari kondisi keenam pilar pembangunan minapolita tersebut.

### 5.2.1 Kondisi Enam Pilar Pembangunan Minapolitan

Gambaran minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan berdasarkan kondisi dari enam pilar pembangunan minapolitan yaitu infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan *governance* adalah sebagai berikut.

#### 1. Kondisi infrastruktur

Program minapolitan merupakan fase lanjutan dari program pembangunan yang sudah ada dengan konsep yang lebih terintegrasi. Sehingga bukan berarti pembangunan yang dimulai dari 0 (nol) atau dari awal. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, tepatnya sejak tahun 2000 PPN Brondong telah melakukan pembenahan fisik berupa perluasan kawasan yang dimulai dari pengerukan kolam pelabuhan, turap dan reklamasi pantai. Hingga saat ini proyek pembangunan terus berlanjut. Pembangunan infrastruktur inilah yang nantinya akan membentuk struktur ruang di kawasan pelabuhan. Lebih jelasnya *masterplan* tata ruang pembangunan infrastruktur dalam pengembangan kawasan PPN Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

Beberapa infrastruktur utama untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap adalah area parkir kapal, area docking, kolam pelabuhan, dermaga, *breakwater*, TPI, sarana jalan, BBM, listrik dan pabrik es. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perikanan di PPN Brondong, serta aktivitas pembangunan infrastruktur jangka panjang yang sampai saat ini masih berlangsung, menyebabkan kondisi di sekitar area pelabuhan belum bisa tertata rapi. Akibat reklamasi pantai sebagian nelayan kehilangan lahan untuk area

parkir kapal, sehingga nelayan parkir disembarang tempat dan tidak tertib. Kondisi kapal yang berdesak-desakan seringkali mengalami kerusakan akibat saling berbenturan bila terjadi angin atau ombak besar. Sebelumnya, dinas pelabuhan telah menghimbau agar nelayan parkir di Sedayu. Namun jaraknya yang jauh dari pusat kegiatan perikanan seperti pelabuhan dan TPI, nelayan kesulitan melakukan interaksi dengan pedagang darat maupun aktivitas bongkar muat mengingat kebutuhan logistik sebagian besar dipasok dari dalam area pelabuhan. Berikut adalah salah satu gambaran area parkir kapal kurang tertib akibat dari kekurangan lahan setelah reklamasi pantai.



Gambar 7. Area parkir kapal kurang tertib

PPN Brondong belum memiliki area khusus untuk docking kapal. Selama ini, nelayan melakukan docking kapal di sembarang tempat yang dianggap memadai untuk aktivitas docking. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah bekerja sama dengan investor untuk membuka area khusus untuk docking kapal. Sejauh ini, pembangunan area khusus docking kapal ini baru berjalan pada tahap reklamasi pantai. Aktivitas docking kapal yang dilakukan oleh nelayan Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8. Belum ada area khusus untuk docking kapal

Pembangunan *breakwater* yang dimulai sejak tahun 2005 hingga kini belum terselesaikan, hal ini selain karena faktor pembiayaan juga karena nelayan tidak setuju dengan rancangan bangunan *breakwater* pada tahap selanjutnya. Rencana rancangan bangunan *breakwater* yang mendekati pintu masuk kapal ke kolam pelabuhan tersebut dinilai nelayan tidak sesuai dengan arah angin dan arus air laut. Sehingga dikhawatirkan nantinya kapal akan mengalami kesulitan ketika memasuki pintu masuk pelabuhan. Berikut adalah gambar bangunan *breakwater* di PPN Brondong.



Gambar 9. Bangunan *breakwater*

Selain itu, pembangunan *breakwater* ini juga menyebabkan pendangkalan kolam pelabuhan di sekitar dermaga lama yang mempersulit nelayan melakukan tambat labuh, sehingga menghambat aktivitas bongkar muat. Untuk mensiasati

kondisi tersebut, dermaga baru yang sebenarnya belum terealisasi secara sempurna terpaksa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Sebagian nelayan melakukan tambat labuh di dermaga baru dan mengisi perbekalan disana. Sedangkan untuk aktivitas bongkar hasil tangkapan tetap dilakukan di dermaga lama agar tetap dekat dengan TPI. Jika melakukan kegiatan bongkar di dermaga pelabuhan baru, maka nelayan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut hasil tangkapan melalui jalan darat menuju TPI. Pertimbangan jarak TPI inilah yang menyebabkan nelayan tetap memilih melakukan kegiatan bongkar di area dermaga lama. Berikut adalah gambaran aktivitas nelayan di pelabuhan baru.



Gambar 10. Pengisian perbekalan melaut

Kondisi gedung TPI yang ada saat ini dengan fasilitas yang minim tidak mampu lagi mengakomodasi kegiatan perdagangan ikan secara optimal. Selain itu, kebiasaan nelayan dan pedagang ikan yang kurang tertib dan tidak menjaga kebersihan menyebabkan lingkungan sekitar TPI nampak kumuh, sehingga berdampak pada kondisi ikan yang kurang higienis. Sementara itu, pembangunan TPI baru belum terealisasi sempurna sehingga belum bisa difungsikan. Gambaran kondisi TPI Brondong adalah sebagai berikut.



Gambar 11. Kondisi TPI Brondong

Kebutuhan logistik utama nelayan untuk perbekalan melaut seperti es balok dan BBM dipasok dari dalam area pelabuhan melalui pabrik es dan SPDN yang dikelola oleh pihak perum, namun dengan kapasitas yang terbatas. Sehingga kekurangan pasokan diambil dari luar kawasan pelabuhan. Kebutuhan air bersih dipasok dari tandon air tawar yang dikelola oleh dinas pelabuhan. Untuk jaringan listrik di area pelabuhan sebagian dikelola oleh dinas pelabuhan dan sebagian lagi dikelola oleh pihak perum. Sedangkan kebutuhan es curai untuk pedagang ikan di sekitar TPI, dipenuhi melalui agen penggilingan es disekitar area pelabuhan.

Untuk sarana jalan, lalu lalang kendaraan pengangkut ikan serta keterbatasan luas jalan menuju kawasan pelabuhan seringkali menimbulkan kemacetan. Hal ini tentunya akan memperpanjang waktu distribusi ikan ke *cold storage*, yang berdampak pada kualitas ikan. Namun kerusakan jalan di dalam kawasan pelabuhan diperbaiki dengan pembangunan jalan kompleks. Secara keseluruhan, keterbatasan-keterbatasan infrastruktur di PPN Brondong masih bisa ditanggulangi. Mengingat status pelabuhan ini sudah termasuk dalam pelabuhan tipe B, maka infrastruktur yang dimiliki dianggap cukup memadai.

## 2. Masyarakat dan Bisnis

Sebagian besar masyarakat pantura di Kabupaten Lamongan berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 2011, jumlah nelayan tetap sebanyak 24.263 orang, nelayan sambilan sebanyak 3.567 orang dan nelayan kadang-kadang 324 orang. Komponen utama yang berperan dalam sistem minabisnis di kabupaten Lamongan adalah armada payang dan *long line* yang menghasilkan komoditas unggulan berupa tongkol, kembung, layang dan kuniran. Komoditas ini merupakan pasokan bahan baku baik bagi usaha pengolahan skala kecil maupun besar.

Tingginya aktivitas perikanan di kawasan pelabuhan tidak hanya mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian di bidang perikanan tetapi juga non perikanan, baik di dalam maupun di luar kawasan pelabuhan. Jenis usaha yang terdapat di areal pelabuhan adalah 29 warung makan, 20 gudang ikan dan *processing*, tiga kios, 12 toko bahan dan alat perikanan. Usaha-usaha ini menyerap tenaga kerja sebanyak berikut.

Tabel 16. Jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam areal pelabuhan 2011

No.	Pekerjaan	Tenaga Kerja (orang)
1.	Bakul Kecil	42
2.	Penjual/Agen	90
3.	Tukang Becak	187
4.	Kuli Pikul, timbang, dan sortir	725
5.	Nelayan	12.955
6.	Pedagang	87
7.	Tenaga Kerja Lain	332
<b>Total</b>		<b>14.418</b>

Sumber : Profil PPN Brondong tahun 2012

Kegiatan usaha perikanan disini tidak hanya usaha penangkapan, tetapi juga ditunjang dari usaha pengolahan. Usaha pengolahan perikanan skala kecil di luar kawasan pelabuhan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Usaha perikanan skala kecil di Kec. Brondong dan Kec. Paciran

No	Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Omset/ bulan (Juta)	Kapasitas Produksi (Ton)	Daerah Pemasaran	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Pemindangan	58	7,5 – 35	16 – 77	Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung, Blitar, Madiun, Bojonegoro	6 - 31
2.	Penggaraman	17	18 – 30	5 – 75	Bogor, Bandung, Jakarta, Kediri, Tulungagung, Madiun, Blora	10 - 15
3.	Pengeringan ikan	42	10 – 15	28 - 42	Bogor, Bandung, Jakarta	10
4.	Pengasapan	27	3 – 5	0,3 – 0,5	Lamongan	3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2011

Masing-masing usaha ini rata-rata menyerap lebih banyak tenaga kerja wanita daripada laki-laki, sehingga sesuai untuk kesibukan istri-istri nelayan saat suaminya melaut. Berikut adalah gambar usaha perikanan skala kecil di sekitar kawasan PPN Brondong, yaitu usaha pemindangan dan pengeringan ikan.



Gambar 12. Usaha perikanan skala kecil di Desa Brondong

Usaha ini tidak hanya menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Lamongan tetapi juga dari daerah tetangga yaitu Tuban dan Bojonegoro. Sebagian besar para pengusaha ini mengutamakan membeli bahan baku dari TPI Brondong, bahan baku baru akan didatangkan dari luar daerah apabila pasokan bahan baku di TPI Brondong tidak mampu memenuhi. Dengan pengelolaan kawasan minapolitan yang lebih terintegrasi diharapkan akan ada peningkatan produksi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri perikanan. Jumlah produksi ikan sepanjang tahun 2002 sampai tahun 2011 meskipun tidak menunjukkan peningkatan namun cukup stabil dengan nilai produksi yang semakin meningkat. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan mulai tahun 2002 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan tahun 2002 – 2011

No	Tahun	Produksi (ton)	Nilai Produksi (x Rp. 1000,-)
1.	2002	22.883	25.914.588
2.	2003	30.288	107.165.722
3.	2004	45.947	209.729.756
4.	2005	39.947	229.885.367
5.	2006	46.569	306.464.220
6.	2007	60.769	421.183.449
7.	2008	52.249	442.323.513
8.	2009	57.198	495.413.039
9.	2010	46.432	437.815.289
10.	2011	49.278	511.785.120

Sumber : Profil PPN Brondong tahun 2012

Sedangkan untuk jenis ikan olahan dengan jumlah produksi mulai tahun 2007 hingga 2011 yaitu sebagai berikut :

Tabel 19. Jenis ikan olahan tahun 2007-2011

No	Tahun	Pindang (ton)	Asin (ton)	Panggang (ton)	Fillet (ton)
1.	2007	2.800	9.218	4.200	3.893
2.	2008	2.493	7.866	2.925	4.013
3.	2009	2.432	7.099	2.700	6.023
4.	2010	2.255	5.522	2.096	4.765
5.	2011	2.206	5.597	1.466	6.263

Sumber : Profil PPN Brondong tahun 2012

Kegiatan perikanan di Kabupaten Lamongan juga ditunjang oleh industri skala besar yang tidak hanya melayani pasar lokal tetapi juga pasar ekspor. Berdasarkan data Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), jumlah ekspor tahun 2010 sebanyak 12.376,52 ton dan tahun 2011 periode bulan januari – juni sebanyak 4.480,42 ton. Negara tujuan ekspor adalah negara - negara uni eropa dan beberapa negara lain. Daftar industri perikanan skala besar di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Usaha perikanan skala besar di Kec. Brondong dan Kec. Paciran

No	Nama Perusahaan/ Pemilik	Jenis Usaha	Produksi/Tahun
1.	PT . HATNI	Pembekuan Ikan	10.000 ton
2.	PT. ANELLA	Fillet Beku	
3.	PT. BAHARI BIRU NUSANTARA	Pembekuan Ikan	1.800 ton
4.	PT. 689	Pembekuan Ikan	2.400 ton
5.	PT. STAR FOOD	Fillet Beku	9.500 ton
6.	PT. QL HASIL LAUT	Surimi	8.000 ton

Sumber : Profil PPN Brondong tahun 2012

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan minabisnis di Kabupaten lamongan cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya kapasitas produksi perikanan dan jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan tersebut serta kemampuan dari masyarakat untuk mengolah produk perikanan hingga mampu menembus pasar ekspor.

### 3. Sumberdaya dan Tata Ruang

PPN Brondong sebagai basis utama perikanan laut di wilayah utara Jawa Timur karena daerah tangkapnya (*fishing ground*) adalah laut utara jawa yang menjangkau perairan laut lepas pantai, yang sangat potensial dengan beragam jenis ikan baik pelagis maupun demersal. Laut utara jawa timur menunjukkan tipe perikanan multi spesies yang sebenarnya. *Fishing ground* di Laut Jawa terletak di Perairan Masalembu, Matasiri dan Bawean. Kegiatan perikanan di pantura Lamongan ini didukung oleh lima tempat pendaratan ikan yaitu TPI Brondong,

TPI Lohgung, TPI Labuhan, TPI Weru dan TPI Kranji. Dengan komoditas unggulan adalah tongkol, layang, kembung dan kuniran.

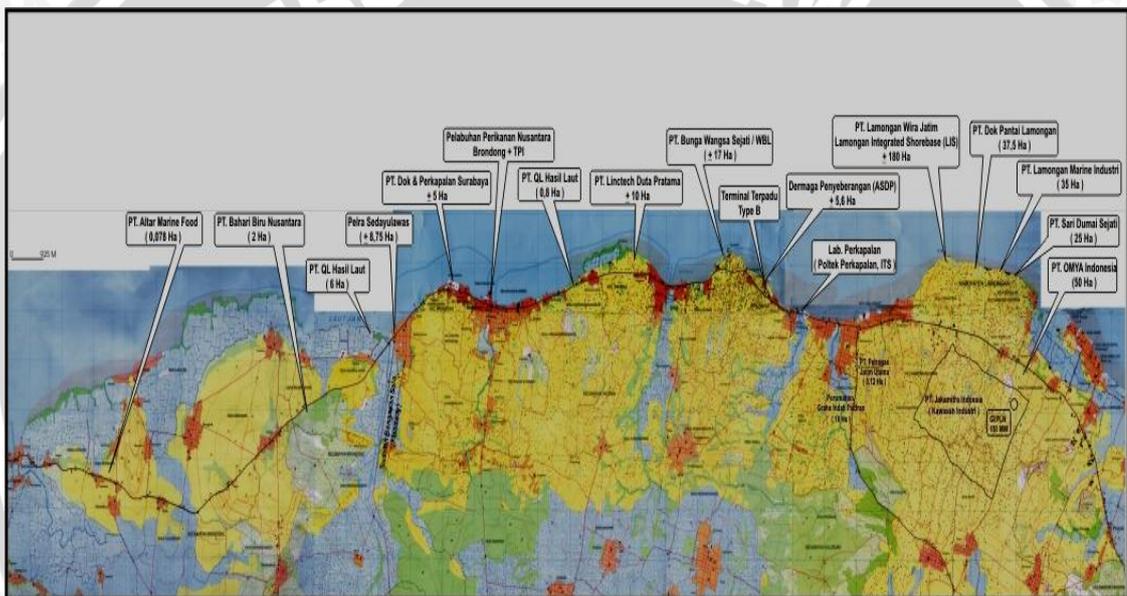
Berdasarkan status tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) maka perairan laut jawa telah dinyatakan *overfishing*. Sehingga dilarang adanya penambahan bahkan mengurangi jumlah armada maupun alat tangkap. Kondisi ini juga menyebabkan jangkauan berlayar nelayan yang semakin jauh hingga mendekati Pulau Kalimantan maupun Sulawesi. Upaya pengkayaan stok ikan dan pengendalian yang sudah dilakukan di daerah Lamongan adalah dengan penanaman terumbu karang, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengawasan *illegal fishing*. Berikut adalah jenis – jenis ikan yang didaratkan di PPN Brondong tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Brondong tahun 2011

No.	Jenis Ikan	Volume (Kg)	No.	Jenis Ikan	Volume (Kg)
1.	Alu – Alu	88.900	18.	Kurisi	89.188
2.	Ayam – Ayam	1.056.600	19.	Kuwe	696.880
3.	Banyar	183.328	20.	Layang	5.423.944
4.	Beloso	798.740	21.	Lencam	91.650
5.	Bawal Hitam	44.900	22.	Lemuru	52.666
6.	Baronang / Sadar	34.500	23.	Lemadang	143.540
7.	Cucut	268.606	24.	Layur	90.265
8.	Campuran	564.540	25.	Mata Besar/ Swanggi	11.317.769
9.	Cumi - Cumi	357.888	26.	Manyung	635.127
10.	Ikan Jaket	185.100	27.	Peperek	223.850
11.	Ikan Sebelah	107.650	28.	Pari	775.444
12.	Kakap Merah	310.750	29.	Selar Kuning	38.345
13.	Kembung	97.967	30.	Tenggiri	227.800
14.	Kuningan	15.735.315	31.	Tongkol	545.556
15.	Kerapu	334.830	32.	Tembang	22.500
16.	Kerong– Kerong	138.875	33.	Tonang	232.500
17.	Kapas-Kapas	8.362.795			
<b>Jumlah Total</b>		<b>49.278.306</b>			

Sumber : Profil PPN Brondong tahun 2012

Sesuai dengan Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, maka kecamatan Brondong termasuk dalam Sub Satuan Wilayah Pembangunan III (SSWP III) yang kegiatan pembangunannya dititik beratkan pada sektor intensifikasi produk perikanan laut, tambak udang, agro industri, perkebunan dan pariwisata. Secara umum pantai di wilayah Kabupaten Lamongan dimanfaatkan untuk industri, budidaya ikan, konservasi, pariwisata dan pemukiman. Pemanfaatan wilayah pantai di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar 13.



Gambar 13. Pemanfaatan wilayah pantai di Kabupaten Lamongan

Dalam pilar sumberdaya dan tata ruang ini, kawasan minapolitan yang telah ditetapkan (Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran) sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Lamongan dimana kawasan ini memang diperuntukkan bagi intensifikasi produk perikanan laut. Sedangkan dari sisi ketersediaan sumberdaya, untuk tetap menjadikan daerah ini sebagai kawasan minapolitan maka perlu dibarengi dengan upaya pengkayaan stok maupun konservasi.

#### 4. Kelembagaan

Berbagai bentuk kelembagaan yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan PPN Brondong adalah sebagai berikut :

- Perum PPS Cabang Brondong, berfungsi untuk penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Contohnya yaitu, penyewaan ruang (ruang pengolahan, ruang pengepakan, gudang ikan), pabrik es dan penyaluran bahan bakar. Selama ini banyak nelayan yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perum. Namun fasilitas yang disediakan oleh perum masih terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan nelayan.
- KUD Mina Tani, berfungsi sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan/ nelayan. Seperti pengelolaan TPI untuk menyelenggarakan pelelangan ikan, mengelola unit simpan pinjam dan penyalur kredit khusus bagi nelayan. Pelayanan simpan pinjam dan kredit yang diberikan oleh KUD Mina Tani ini kurang dimanfaatkan oleh nelayan secara optimal karena karakteristik nelayan yang tidak terbiasa menabung dan lebih percaya kepada rentenir untuk peminjaman kredit.
- Bank Swamitra Mina, merupakan lembaga keuangan yang dibentuk atas kerja sama KUD Mina Tani dan Bank Bukopin yang bertujuan untuk membantu nelayan mengembangkan usahanya dan penyediaan modal. Namun kenyataannya, kebanyakan nelayan menggunakan modal sendiri dalam usahanya dengan alasan tidak memiliki jaminan untuk meminjam modal ke bank, sedangkan armada nelayan tidak dapat dijadikan jaminan.
- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HNSI Cabang Lamongan ini membawahi seluruh Rukun Nelayan (RN) yang ada di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang berjumlah 17 kelompok RN. RN ini selain membantu dalam penyelesaian konflik nelayan dan pengurusan

administrasi kapal, juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan nelayan seperti usaha air bersih.

- Kelompok Usaha Bersama (KUB), merupakan kelompok usaha yang dibentuk untuk meningkatkan produksi. Ada 114 KUB penangkapan yang tersebar di Kecamatan Brondong dan Paciran dengan aset usaha berupa kapal, mesin kapal dan alat tangkap. Sedangkan untuk KUB pengolahan terdapat 83 kelompok dengan jenis olahan yang bermacam-macam yaitu krupuk, bakso, nugget, abon, bandeng presto, terasi dan petis ikan.

Untuk mengoptimalkan peran kelembagaan dalam menunjang program minapolitan perlu adanya sosialisasi kepada nelayan agar lebih memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Serta peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan yang pro nelayan, sehingga timbul kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk lebih memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

#### 5. Teknologi

Teknologi disini mencakup teknologi penangkapan ikan, pasca tangkap, pengolahan, transportasi serta teknologi sosial yang dapat menjamin keberlanjutan dari investasi dan perdagangan pada kawasan minapolitan. Pemilihan teknologi tersebut akan menjamin mutu hasil tangkapan sampai ke konsumen, mendorong terjaminnya keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing.

Semua nelayan Lamongan menggunakan teknologi GPS untuk mengetahui *fishing ground* dan alat bantu penangkapan berupa rumpon. Sedangkan alat tangkap yang digunakan bervariasi yaitu payang besar/ cantrang, payang kecil/dogol, *purse seine*, *gillnet*, *rawai*/ pancing dan bubu. Alat tangkap yang

paling mendominasi adalah payang besar/ cantrang dengan armada 10 - 30 GT, payang kecil/ dogol dengan armada 5 - 20 GT, dan rawai/ pancing 5 – 20 GT. *Purse seine* dioperasikan dengan armada yang besar yaitu 30 – 50 GT namun jumlahnya sedikit. Gambaran teknologi penangkapan yang ada di PPN Brondong adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Alat dan armada penangkapan

Distribusi ikan dari PPN Brondong ke pasar terdekat (Lamongan atau Tuban) umumnya menggunakan kendaraan roda empat bak terbuka dan ikan diletakkan di dalam drum yang dilengkapi es curai, *cool box* ataupun *box fiber*. Sedangkan pengiriman ikan ke pabrik pengolahan atau *cold storage* biasanya dilakukan dengan kontainer yang dilengkapi dengan pendingin. Untuk pabrik pengolahan ikan di Lamongan umumnya mengolah produk dalam bentuk *fresh* atau *frozen*. Sedangkan untuk industri skala kecil ikan diolah menjadi ikan kering, ikan asap dan pemindangan dengan teknologi yang sederhana, seperti pada gambar 15 berikut.



Gambar 15. Teknologi pengolahan sederhana

Dari uraian di atas, dari sisi teknologi tidak terdapat kendala yang berarti. Karena dengan armada yang sederhana mampu memperoleh hasil tangkapan di atas kapasitas. Yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah teknologi *handling* dan pengolahan. Untuk teknologi *handling*, nelayan perlu meningkatkan faktor higienis ikan sehingga mutunya terjamin sampai ke tangan konsumen. Sedangkan untuk teknologi pengolahan perlu adanya peningkatan diversifikasi produk guna meningkatkan nilai tambah produk.

#### 6. Kebijakan dan *Governance*

Kawasan minapolitan PPN Brondong memerlukan dukungan kebijakan untuk memfungsikan berbagai aspek dari pilar minapolitan. Kebijakan yang paling penting adalah keluarnya Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan program minapolitan, serta menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk mendukung program tersebut. SK Bupati terkait Penetapan Kawasan Minapolitan dapat dilihat pada lampiran ?? . Sejauh ini untuk pembangunan fisik pemda Kabupaten Lamongan masih menggantungkan dari

APBN sebagai satu-satunya sumber dana, sedangkan alokasi APBD II hanya digunakan untuk rehabilitasi gedung atau pengadaan alat-alat penunjang.

Kebijakan pada kawasan minapolitan diperlukan untuk memberi insentif kepada semua pihak yang terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan. Insentif tersebut dapat berupa kemudahan pengurusan dokumen pemberangkatan kapal, jaminan keamanan bongkar ikan, jaminan harga ikan, kepastian dan kecukupan memperoleh BBM, kelancaran dan jaminan sistem distribusi ikan.

Kemudahan-kemudahan yang telah diberikan selama ini meliputi kemudahan terkait dengan pengurusan dokumen – dokumen kapal, yaitu pelayanan melalui syahbandar. Namun untuk surat-surat yang memerlukan izin dari tingkat propinsi maka pegawai syahbandar akan membantu menguruskan dengan biaya transportasi perizinan tetap ditanggung nelayan. Selain itu, kelonggaran yang diberikan bagi nahkoda kapal diatas 30 GT yang belum memiliki sertifikat ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan) masih diperbolehkan menggunakan SKK (Surat Kecakapan Kemudi). Sedangkan kebijakan yang diberikan terkait dengan jaminan harga ikan adalah dengan melarang nelayan luar daerah untuk menjual ikan di TPI Brondong dengan harga lebih murah, karena hal ini akan merugikan nelayan Lamongan. Dari sisi kebijakan ini, pemerintah masih harus terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang pro nelayan.

### **5.2.3 Perhitungan Indeks Kesiapan Pelaksanaan Minapolitan**

Perhitungan nilai indeks untuk mengetahui tingkat kesiapan pelaksanaan program minapolitan dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Indeks kesiapan PPN Brondong sebagai kawasan minapolitan

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
3. Infrastruktur		<b>20</b>			<b>14,7</b>
	j. Fungsi dermaga pendaratan ikan	2	0 – 100	70	1,4
	k. Keberadaan dan peran pabrik es	2	0 – 100	80	1,6
	l. Persediaan pasokan listrik	2	0 – 100	80	1,6
	m. Kondisi kolam pelabuhan	3	0 – 100	60	1,8
	n. Kecukupan pasokan BBM	2	0 – 100	80	1,6
	o. Ketersediaan pasokan air bersih	2	0 – 100	80	1,6
	p. Kondisi jalan raya	2	0 – 100	70	1,4
	q. Kondisi transportasi dan logistik	2	0 – 100	80	1,6
	r. Kesesuaian kapal dan alat tangkap dengan tujuan minapolitan	3	0 – 100	70	2,1
4. Masyarakat dan bisnis		<b>20</b>			<b>17,5</b>
	e. Peran penduduk lokal dalam penangkapan ikan di kawasan minapolitan	5	0 – 100	100	5
	f. Kemampuan penduduk lokal dalam mengolah hasil perikanan	5	0 – 100	90	4,5
	g. Kemampuan penduduk lokal dalam memasarkan hasil perikanan	5	0 – 100	80	4

Lanjutan dari tabel 22.

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
	h. Kemampuan penduduk lokal memanfaatkan peluang bisnis lainnya terkait dengan minapolitan	5	0 – 100	80	4
<b>5. Sumberdaya dan tata ruang</b>		<b>15</b>			<b>13,75</b>
	d. Ketersediaan dokumen RTRW	5	0 – 100	100	5
	e. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi ikan	5	0 – 100	75	3,75
	f. Ketersediaan masterplan pengembangan kawasan minapolitan	5	0 – 100	100	5
<b>6. kelembagaan</b>		<b>15</b>			<b>11,3</b>
	e. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan minapolitan	4	0 – 100	100	4
	f. SK Bupati/Walikota tentang kelompok kerja pengelolaan kawasan minapolitan	4	0 – 100	100	4
	g. Persepsi kelembagaan formal tentang minapolitan	4	0 – 100	60	2,4
	h. Persepsi masyarakat tentang minapolitan	3	0 – 100	30	0,9

Lanjutan dari tabel 22.

Pilar Minapolitan	Indikator Kesiapan Utama	Bobot	Batasan Skor	Skor	Nilai
7. Teknologi	d. Ketersediaan informasi teknologi produksi untuk mendukung minapolitan	15 5	0 – 100	80	12 4
	e. Ketersediaan informasi tentang teknologi handling dan pengolahan ikan	5	0 – 100	80	4
	f. Ketersediaan informasi tentang cara pemasaran ikan	5	0 – 100	80	4
8. Kebijakan dan Governance	d. Persepsi pemda tentang minapolitan	15 5	0 – 100	60	9 3
	e. Komitmen pemda tentang minapolitan	5	0 – 100	60	3
	f. Strategi implementasi model minapolitan	5	0 – 100	60	3
<b>Total Nilai</b>		<b>100</b>			<b>78,25</b>

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan indeks kesiapan pada tabel di atas, diperoleh indeks kesiapan sebesar 78,25. PPN Brondong dapat dikategorikan sebagai kawasan yang siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan. Akselerasi kelembagaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar kelembagaan maupun komunikasi dengan masyarakat. Hal ini akan mendorong peningkatan pelayanan dari lembaga-lembaga tersebut dan adanya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Di sisi lain, upaya peningkatan

perekonomian masyarakat perlu dibarengi dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat baik nelayan maupun seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam program minapolitan. Hal ini guna meningkatkan pemahaman mereka terkait arah kebijakan dari program minapolitan, sehingga timbul kesadaran terhadap perannya masing-masing. Dengan begitu diharapkan akan tercipta kerjasama yang baik antar semua komponen dalam mencapai tujuan minapolitan.

### 5.3 Konsistensi antara Perencanaan dan Pelaksanaan Program Minapolitan

#### 5.3.1 Perencanaan Minapolitan

Sasaran program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1) Perbaiki sumberdaya ikan.

Program yang dicanangkan adalah *re-stocking* SDI melalui kegiatan pemasangan rumpon atau apartemen ikan di wilayah perairan Lamongan.

2) Perbaiki desain palkah kapal penangkap ikan

Program ini dapat dilakukan melalui pembuatan satu kapal contoh dengan mempunyai desain palkah yang sesuai standar (luasan dan standar pendinginan), dengan ini diharapkan ikan hasil tangkapan terjamin mutunya dan higienis.

3) Pembangunan ekonomi kerakyatan

Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi :

- a. Program pemberdayaan usaha kecil pedesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit bunga rendah
- b. Pembangunan perikanan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan peningkatan pendapatan nelayan

- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa
  - d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan
- 4) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
- Program peningkatan kualitas SDM wilayah pedesaan di prioritaskan pada :
- a. Program pengembangan pendidikan dan pelatihan
  - b. Program perluasan kerja dan kesempatan kerja
  - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
- 5) Pembangunan infrastruktur
- Program untuk pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan dalah :
- a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan pedesaanan
  - b. Pembangunan prasarana perokonomian
  - c. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/ kelurahan
- Infrastruktur yang akan dikembangkan disesuaikan dengan masterplan PPN Brondong.
- 6) Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan
- Berdasarkan *The UN Code of Conduct for Responsibility Fisheries*, maka setiap pelaku usaha dibidang perikanan harus memperhatikan sistem pengelolaan sumberdaya yang ramah lingkungan.

Secara terperinci perencanaan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong telah dituangkan dalam bentuk *Masterplan* Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011. *Masterplan* ini memuat gambaran kondisi saat ini, deskripsi sentra minabisnis yang akan diwujudkan,

rincian kegiatan yang harus dilaksanakan, kontribusi yang harus diberikan setiap sektor, subsektor maupun institusi sektoral, subsektoral maupun institusi lainnya. Dilengkapi juga dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian di tingkat lokasi kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat. Rencana aksi dari program ini diwujudkan dalam bentuk matrik program kegiatan minapolitan yang telah tersusun mulai dari tahun 2012 hingga 2016, meliputi tiga kelompok kegiatan yaitu infrastruktur, kegiatan perikanan dan kegiatan non perikanan. Matrik program kegiatan minapolitan perikanan tangkap selama tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran 4.

### 5.3.2 Implementasi Minapolitan

Sejak dikeluarkannya SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah dilaksanakan satu kali sosialisasi, dua kali rapat koordinasi tingkat daerah dan satu kali rapat koordinasi tingkat pusat, serta satu kali monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Implementasi program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan merupakan realisasi dari matrik program yang telah tersusun. Dari 63 kegiatan yang terdapat dalam matrik program kegiatan minapolitan perikanan tangkap tahun 2012, sampai saat ini hanya enam kegiatan yang terlaksana dan sembilan kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang. Menurut hasil wawancara baik dengan pihak DKP maupun Bappeda kabupaten Lamongan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program minapolitan ini adalah keterbatasan anggaran dana yang turun, maka pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan dana yang ada. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak seideal yang tertuang dalam perencanaan. Rincian kegiatan yang sudah terencana, terlaksana dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Perbandingan kegiatan minapolitan yang sudah terlaksana dengan perencanaan

No.	Perencanaan Kegiatan Minapolitan	Implementasi Kegiatan Minapolitan	Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
<b>A.</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung perwakilan PMU, kantor pemasaran, ruang pelatihan dan showroom</li> <li>2. Pembangunan menara pengawas dan pemasangan lampu suar</li> <li>3. Pembangunan penahan gelombang</li> <li>4. Pembangunan gedung untuk dolog perikanan serta prasarananya</li> <li>5. Pembangunan drainase</li> <li>6. Pembangunan IPAL</li> <li>7. Pembangunan lahan parkir</li> <li>8. Sosialisasi kegiatan pembangunan berbasis perikanan tangkap</li> <li>9. Pembangunan kolam tambat labuh</li> <li>10. Pembangunan cold storage</li> <li>11. Penataan lansekap PPI Kranji</li> <li>12. Pembangunan TPI baru yang higienis</li> <li>13. Pembangunan kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran</li> <li>14. Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) dan instalasi showroom</li> <li>15. Pembangunan kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Brondong</li> <li>16. Pembangunan kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran</li> <li>17. Pengadaan kendaraan operasional perikanan tangkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan breakwater</li> <li>2. Pavingstone jalan pesisir Kecamatan Paciran</li> <li>3. Perencanaan, pengawasan dan pemborongan jalan kompleks</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi breakwater</li> <li>2. Pembangunan kantor POKMASWAS</li> <li>3. Pemborongan pengadaan instalasi listrik</li> </ol>

Lanjutan dari tabel 23

No.	Perencanaan Kegiatan Minapolitan	Implementasi Kegiatan Minapolitan	Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
	18. Pendanaan operasional PMU 19. Pembangunan jalan CBC dan rehabilitasi jalan menuju TPI 20. Perbaikan dermaga TPI Labuhan Tengah 21. Perbaikan dermaga TPI Labuhan Barat 22. Pembangunan jalan kompleks 23. Pembangunan pintu gerbang 24. Pembangunan toilet umum 25. Rehabilitasi sungai (pendalaman sungai) 26. Pembangunan jalan produksi		
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Perikanan</b>		
	1. Desain palkah serta sarana handling ikan untuk kapal contoh 2. Validasi data kapal penangkap ikan dan nelayan 3. Pengadaan rumpon dasar/ apartemen ikan 4. Pembuatan kartu nelayan 5. Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi usaha perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan 6. Inventarisasi pasar produk tangkap dan hasil olahan 7. Pengembangan budidaya laut melalui pelatihan 8. Pembinaan pasca panen dan pemasaran 9. Pelatihan penanganan ikan dikapal dan saat bongkar di pelabuhan 10. Pelatihan permesinan kapal	1. Pengadaan rumpon dasar/ apartemen ikan (5 unit) 2. Pembinaan pengembangan usaha perikanan (pembinaan KUB perikanan tangkap) 3. Pengadaan timbangan ikan	1. Pengadaan alat tangkap perikanan (bubu) 2. Pengadaan payang teri 3. Peningkatan K3 di kawasan TPI 4. Review masterplan 5. Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 1) 6. Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 2)

Lanjutan dari tabel 23

No.	Perencanaan Kegiatan Minapolitan	Implementasi Kegiatan Minapolitan	Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
	11. Pelatihan dan pengenalan alat bantu penangkapan (GPS, Fish Finder, FAD) 12. Pelatihan manajemen operasi penangkapan ikan 13. Pelatihan teknik penangkapan ikan 14. Paket alat tangkap ramah lingkungan 15. Pembinaan pengembangan usaha perikanan 16. Pengadaan sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuhan Tengah 17. Pengadaan radio SSB 2 Band sebagai fasilitas komunikasi di TPI Labuhan Tengah 18. Pengadaan genset di TPI Labuhan Tengah 19. Pengadaan mesin pompa air untuk TPI Labuhan Tengah 20. Pengadaan sarana basket untuk untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuhan Barat 21. Pengadaan genset di TPI Labuhan Barat 22. Pengadaan timbangan 23. Pengadaan sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan		
<b>C.</b>	<b>Kegiatan Non Perikanan</b>		
	1. Pembuatan profil investasi 2. Identifikasi dan infentarisasi lembaga keuangan/ permodalan daerah 3. Penggalangan modal investasi budidaya laut/ KJA		

Lanjutan dari tabel 23

No.	Perencanaan Kegiatan Minapolitan	Implementasi Kegiatan Minapolitan	Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pembinaan pasar produksi perikanan tangkap dengan cold storage dan ekspor</li><li>5. Penggalangan akses kemitraan usaha</li><li>6. Pengembangan sistem informasi data perikanan tangkap</li><li>7. Peningkatan peran kelembagaan ekonomi</li><li>8. Pembuatan profil lembaga organisasi laut</li></ol>		

Dalam implementasi program kebijakan ada empat variabel penting, yaitu komunikasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

#### 1) Komunikasi (*communications*)

Komunikasi dalam pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat. Koordinasi diwujudkan dalam bentuk rakor (rapat koordinasi) antar *stakeholder* dan sosialisasi program kepada masyarakat. Koordinasi kondisional dan mendesak dilakukan melalui telephon. Kendala komunikasi yang dihadapi dari sisi masyarakat adalah sebagian nelayan masih bersifat apatis kepada kebijakan pemerintah sehingga tidak terlalu memperdulikan adanya sosialisasi. Sifat apatis masyarakat terhadap pemerintah ini sebagai akibat dari kegagalan atau implementasi dari program-program terdahulu yang kurang optimal sehingga timbul kekecewaan yang terus – menerus kepada pemerintah.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada para nelayan pemilik kapal, beberapa dari mereka mengaku sering mendapat undangan dan ada yang tidak. Namun nelayan yang mendapat undangan tidak memprioritaskan undangan tersebut dengan alasan kesibukan melaut atau enggan saja. Sedangkan dari sisi pemerintah adalah undangan rakor yang ditujukan kepada nelayan seringkali mendadak bahkan terlambat sampai ke tangan nelayan, sehingga mereka seringkali tidak mengikuti rakor atau kegiatan lain. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan komunikasi secara dua arah, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

## 2) Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan meliputi SDM, kewenangan, sarana dan prasarana, pendanaan. *Stakeholder* disini tidak hanya dari kalangan pejabat instansi yang terkait tetapi juga dari masyarakat nelayan pemilik kapal. Dengan kualitas SDM nelayan yang rendah maka pemerintah benar-benar harus berusaha memahami mereka terkait arah kebijakan minapolitan, sehingga mereka bisa mentransfer dan menyebarkan pemahaman mereka kepada nelayan yang lain. Sarana dan prasarana terkait erat dengan pendanaan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda dan DKP Kabupaten Lamongan, kendala pelaksanaan kegiatan dalam matrik program termasuk pembangunan infrastruktur adalah minimnya anggaran dana yang turun, sementara itu tidak ada alternatif sumber pendanaan lain. Sehingga waktu pelaksanaan maupun tingkat pelaksanaannya disesuaikan dengan dana yang ada.

## 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Komitmen dari implementator sudah cukup baik, hal ini terbukti dari terpenuhinya persyaratan minapolitan secara administratif, yaitu sesuai dengan RTRW daerah, masuk ke dalam RPIJMD, adanya SK bupati terkait penetapan kawasan dan tim POKJA, dan kontribusi APBD. Namun berdasarkan hasil wawancara baik dengan pihak pemda maupun DKP Lamongan, tanggapan mereka biasa-biasa saja dengan adanya program minapolitan. Kurangnya antusiasme mereka disebabkan karena mereka menganggap bahwa pada hakikatnya program minapolitan tujuannya sama dengan program-program sebelumnya.

#### 4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Menilai dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan program minapolitan maka tim POKJA yang terbentuk sudah sesuai dengan kewenangannya. Kendala yang dihadapi adalah adanya pergantian tokoh minapolitan di dinas PPN Brondong sebagai instansi pelaksana program. Yaitu Sukardono, SH, M.Hum karena sudah pensiun maka digantikan oleh Ir. Ririn Sugihariyati. Sehingga membutuhkan waktu untuk transfer informasi dan pemahaman bagi tokoh minapolitan yang baru. Selain itu, perubahan struktur birokrasi di pusat juga mempengaruhi pelaksanaan program minapolitan. *Reshuffle* menteri perikanan dan kelautan dari Fadel Muhammad sebagai pencetus minapolitan yang kemudian digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo dengan membawa program baru yaitu industrialisasi perikanan, menyebabkan minapolitan tidak lagi menjadi program unggulan. Hal ini mengurangi antusiasme dari implementator dalam melaksanakan program minapolitan.

#### 5.3.3 Evaluasi terhadap konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan

Evaluasi terhadap konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan perikanan tangkap ini lebih ditekankan pada kecocokan antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. terjelasnya dapat dianalisis berdasarkan variabel pada tabel 27.

Tabel 27. Analisis antara perencanaan dan pelaksanaan program minapolitan

No	Variabel	Analisis	Keterangan
	Perencanaan dengan tujuan	Perencanaan program yang telah disusun dalam masterplan sesuai dengan tujuan minapolitan perikanan tangkap di Kabuapten Lamongan.	Sesuai
	Pelaksanaan dengan perencanaan	Dari 63 matrik program yang direncanakan hanya enam yang terlaksana, dengan sembilan kegiatan lain sebagai penunjang	Belum sesuai

Lanjutan dari tabel 27.

No	Variabel	Analisis	Keterangan
3.	Proses jalannya program dengan perencanaan	Tingkat kemajuan pelaksanaan program sangat rendah dibandingkan dengan perencanaan. Contoh : - Pengadaan rumpon dasar dengan target 100 unit hanya terealisasi sebanyak 5 unit. - Pembinaan pengembangan usaha perikanan hanya terlaksana pembinaan KUB, sedangkan pembentukan Forum Komunikasi Minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu usaha dan pelatihan kewirausahaan belum terlaksana.	Belum sesuai
4.	Hasil pelaksanaan dengan tujuan	Pelaksanaan program minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong ini masih dalam tahap awal, sehingga hasilnya belum bisa dirasakan sepenuhnya saat ini. Kegiatan pembinaan dan pengadaan alat-alat cukup menunjang kegiatan operasional perikanan meskipun belum optimal. Sedangkan dampak sementara yang dihasilkan akibat pembangunan infrastruktur seperti <i>breakwater</i> adalah terjadi pendangkalan kolam pelabuhan sehingga kapal sulit melakukan tambat labuh di dermaga, dan akibat aktivitas pembangunan jalan kondisi disekitar pelabuhan tidak bisa tertata rapi. Secara keseluruhan hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	Belum sesuai
5.	Waktu pelaksanaan dengan perencanaan	Alternatif perencanaan dari matrik program yang tidak terlaksana pada tahun 2012 akan diundur ke tahun 2013 atau ke tahun-tahun berikutnya tergantung dari anggaran dana yang turun. Sehingga waktu pelaksanaan program lebih panjang dari perencanaan.	Tidak sesuai

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dalam tahap implementasinya, pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan dana, tidak ada sumber pendanaan lain kecuali dari APBN
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama baik antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat
3. Kurangnya antusiasme implementator dalam pelaksanaan program akibat dari perubahan struktur birokrasi baik di tataran pusat maupun pelaksana program itu sendiri
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait arah kebijakan minapolitan

#### 5.4 Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Pedoman Umum Minapolitan, yang tertuang dalam Kepmen No. 18 tahun 2011, maka komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program minapolitan dapat dianalisis melalui variabel – variabel pada tabel 28.

Tabel 28. Analisis komitmen pemerintah daerah terhadap program minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong.

No.	Variabel	Analisis
1.	Sesuai tata ruang daerah	Sesuai dengan Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong termasuk dalam Sub Satuan Wilayah Pembangunan III (SSWP III) yang kegiatan pembangunannya dititik beratkan pada sektor intensifikasi produksi perikanan laut, tambak udang, agroindustri, perkebunan dan pariwisata.

Lanjutan dari tabel 28.

No.	Variabel	Analisis
2	Masuk dalam RPIJM	Sesuai dengan RPIJM Kabupaten Lamongan, program minapolitan masuk dalam kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman.
3.	Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/152/Kep/413.013/2011 tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013 /2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.
4.	Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak	Tercakup semua dalam <i>Masterplan</i> Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011
5.	Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah	Berdasarkan Kesepakatan Pendanaan Bersama Memorandum Program Tahun 2012 – 2016 dalam RPIJMD Kabupaten Lamongan, alokasi anggaran untuk program minapolitan sebesar Rp. 300.000.000/ tahun. Tidak ada sumber dana lain kecuali dari APBN.
6.	Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai	Surat Keputusan bupati Nomor : 188/199/Kep/413.013/2011, tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202.1/Kep/413.013/2010, Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan.
7.	Berkoordinasi dengan propinsi dan pusat	Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi . Sudah terlaksana satu kali rakor dengan pemerintah daerah dan satu kali rakor dengan pemerintah pusat. Koordinasi kondisional dan mendesak dilakukan via telephon.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan analisis di atas, maka secara administratif pemerintah daerah Kabupaten Lamongan cukup berkomitmen dalam pelaksanaan program minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong. Namun dalam tahap

implementasinya, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* serta pengawasan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi di lapang maka pemerintah juga perlu meningkatkan transfer informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih gencar.

Selama ini pembangunan fisik lebih mengandalkan dana yang bersumber dari APBN melalui dinas PPN Brondong, sedangkan alokasi APBD Pemda Kabupaten Lamongan hanya untuk rehabilitasi gedung atau pengadaan alat – alat penunjang. Kedepannya, pemerintah daerah hendaknya lebih mengutamakan APBD daripada APBN sebagai sumber dana karena *multiplier effect* dari program minapolitan ini terlebih dahulu diutamakan untuk peningkatan perekonomian daerah. Karenanya Pemda perlu mencari alternatif pendanaan lain yang sah. Sehingga tercipta perekonomian daerah yang mandiri dan kokoh yang nantinya mampu meningkatkan perekonomian nasional sesuai konsep *bottom up*.

### 5.5 Partisipasi Masyarakat

Pada implementasi program kebijakan, partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program serta sebagai tolok ukur terhadap pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap tujuan kebijakan. Pada program minapolitan perikanan tangkap komponen masyarakat yang utama adalah masyarakat yang bertindak sebagai pelaku usaha penangkapan atau nelayan. Partisipasi nelayan ini dapat dilihat berdasarkan pemahaman nelayan terhadap arah kebijakan program, perannya dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, keikutsertaan dalam organisasi, kepatuhan terhadap tata tertib, dan kesukarelaan dalam melaksanakan kegiatan program.

### 5.5.1 Karakteristik Responden

Responden yang diambil sebagai sampel untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini adalah masyarakat pelaku usaha penangkapan atau nelayan, baik itu pemilik kapal, nahkoda maupun ABK dengan alat tangkap yang berbeda-beda. Nelayan yang diambil adalah nelayan yang berada di kawasan PPN Brondong sebanyak 48 orang. Karakteristik responden yang diambil dapat disajikan dalam tabel 29.

Tabel 29. Karakteristik responden

No.	Alamat	Umur (Th)	Pengalaman Kerja	Jabatan Nelayan	Pendidikan
1.	Brondong	50	35	ABK	SD
2.	Brondong	50	35	ABK	Tidak lulus SD
3.	Brondong	28	10	ABK	SMP
4.	Brondong	31	10	Nahkoda	SD
5.	Brondong	52	35	Pemilik kapal penangkapan	SD
6.	Brondong	50	35	pemilik kapal penangkapan	SD
7.	Brondong	55	35	Pemilik kapal collecting	SD
8.	Blimbing	54	20	Pemilik kapal penangkapan	SMA
9.	Brondong	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
10.	Blimbing	50	30	ABK	SD
11.	Blimbing	45	25	Nahkoda	SMP
12.	Brondong	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
13.	Brondong	42	16	Pemilik kapal collecting	SMA
14.	Brondong	43	25	Nahkoda	SD
15.	Brondong	50	25	ABK	SD
16.	Brondong	22	5	ABK	SMP
17.	Brondong	25	5	ABK	SMP
18.	Brondong	40	10	Nahkoda	SD
19.	Brondong	50	20	ABK	SD
20.	Brondong	47	30	ABK	SD
21.	Brondong	50	30	ABK	SD
22.	Brondong	50	25	ABK	SD
23.	Brondong	45	20	Pemilik kapal collecting	SMP
24.	Brondong	56	35	Pemilik kapal penangkapan	SD

Lanjutan dari tabel 29.

No.	Alamat	Umur (Th)	Pengalaman Kerja	Jabatan Nelayan	Pendidikan
25.	Brondong	55	35	Pemilik kapal penangkapan	SD
26.	Brondong	55	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
27.	Blimbing	50	30	ABK	SD
28.	Brondong	55	30	Pemilik kapal collecting	SD
29.	Blimbing	50	25	Pemilik kapal penangkapan	SD
30.	Blimbing	33	9	Pemilik kapal penangkapan	SMA
31.	Blimbing	42	15	ABK	SMP
32.	Blimbing	40	15	Nahkoda	SMP
33.	Blimbing	45	15	ABK	SD
34.	Blimbing	50	25	ABK	SD
35.	Brondong	54	35	Pemilik kapal penangkapan	SD
36.	Brondong	50	30	ABK	SD
37.	Brondong	50	25	ABK	SD
38.	Blimbing	53	35	Pemilik kapal penangkapan	-
39.	Blimbing	48	30	Pemilik kapal penangkapan	SMP
40.	Blimbing	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
41.	Blimbing	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
42.	Blimbing	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
43.	Blimbing	47	30	Pemilik kapal penangkapan	SD
44.	Blimbing	50	35	Pemilik kapal penangkapan	-
45.	Blimbing	45	20	Pemilik kapal collecting	SD
46.	Blimbing	50	25	Pemilik kapal collecting	SD
47.	Blimbing	50	35	Pemilik kapal penangkapan	Tidak lulus SD
48.	Blimbing	50	30	Pemilik kapal penangkapan	SD

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui karakteristik responden adalah memiliki sebaran umur rata-rata 50 tahun dengan pengalaman kerja rata-rata 30 tahun. Nelayan responden yang diambil berasal dari dua desa yaitu Desa Brondong dan Desa Blimbing, hal ini disebabkan karena kawasan PPN Brondong terletak di perbatasan desa Brondong Kecamatan Brondong dengan Desa Blimbing Kecamatan Paciran. Nelayan pemilik kapal disini tidak hanya nelayan pemilik kapal penangkapan tetapi ada juga yang disebut nelayan *collecting* atau pembeli laut. Nelayan ini tidak melakukan penangkapan tetapi membeli ikan di laut dari kapal-kapal penangkapan kemudian menjualnya di TPI. Rata-rata pendidikan nelayan hanya setingkat SD, sehingga dari segi kecerdasan intelektual mereka memiliki SDM yang rendah.

### 5.5.2 Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan

Hasil dari penyebaran angket dan observasi di lapang maka tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan dapat dilihat pada tabel berikut 30.

Tabel 30. Partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda pernah mendengar tentang program minapolitan?	6	42	48
2. Apakah anda paham tentang minapolitan?	3	45	48
3. Apakah anda pernah mendapat undangan/ ajakan rapat koordinasi?	11	37	48
4. Apakah anda memenuhi undangan rapat koordinasi?	3	45	48
5. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan penyuluhan/ pelatihan?	3	45	48

Lanjutan dari tabel 30.

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda mengajak teman-teman anda untuk mengikuti pelatihan/ penyuluhan?	1	47	48
2. Apakah anda menerapkan hasil dari pelatihan pada usaha anda?	3	45	48
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>306</b>	<b>336</b>

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dari perhitungan pada tabel 26, dapat diperoleh skor untuk partisipasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ partisipasi} &= \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \% \\
 &= \frac{30}{336} \times 100 \% \\
 &= 8,92 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh skor partisipasi masyarakat terhadap program minapolitan sebesar 8,92 %. Minimnya tingkat partisipasi ini selain disebabkan karena sifat apatis nelayan terhadap kebijakan pemerintah, hal ini juga disebabkan faktor kualitas SDM nelayan yang rendah, sehingga jangkauan berpikir mereka terbatas untuk memahami konsep minapolitan. Keterlibatan nelayan dalam program ini baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun saat pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk partisipasinya dalam rapat koordinasi maupun pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan atau penyuluhan. Undangan rapat, penyuluhan maupun pelatihan biasanya hanya diberikan kepada para nelayan pemilik kapal. Bagi pemilik kapal yang ikut melaut, mereka lebih memprioritaskan melaut daripada mengikuti rapat atau kegiatan penyuluhan. Selain itu, pemberian undangan ini juga seringkali terlambat sampai ke tangan nelayan sehingga nelayan tidak mengikuti kegiatan

tersebut. Kebanyakan kegiatan-kegiatan tersebut hanya diikuti oleh nelayan – nelayan yang aktif di RN.

### **5.5.3 Partisipasi masyarakat nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan**

Partisipasi masyarakat nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong dapat dilihat melalui perannya dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, keikutsertaan dalam organisasi, kepatuhan terhadap tata tertib, dan kesukarelaan dalam melaksanakan kegiatan program.

#### **1. Tingkat partisipasi nelayan dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia**

Partisipasi nelayan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dianggap penting karena dengan memanfaatkan fasilitas yang ada berarti tercipta kerjasama antara nelayan dan pemerintah maupun pengelola fasilitas tersebut. Dengan membeli bahan – bahan kebutuhan (logistik dan alat – alat perikanan) yang tersedia di kawasan pelabuhan berarti nelayan telah berinvestasi di kawasan minapolitan, yang mana investasi tersebut nantinya dapat diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka akan menjamin keberlanjutan kegiatan perdagangan di kawasan minapolitan. Hasil skoring tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31. Tingkat partisipasi nelayan berdasarkan pemanfaatan fasilitas

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda membeli es balok di pabrik es Perum yang berada di kawasan pelabuhan?	24	24	48
2. Apakah anda membeli BBM dari SPDN di area pelabuhan?	24	24	48
3. Apakah anda memanfaatkan bantuan kapal/ alat tangkap dari pemerintah untuk usaha anda?	6	42	48
4. Apakah anda memanfaatkan pelayanan dari Bank Swamitra Mina atau bank lain yang ada di area pelabuhan untuk peminjaman modal usaha?	0	48	48
5. Apakah anda memanfaatkan pelayanan dari Bank Swamitra Mina atau bank lain yang ada di area pelabuhan untuk menabung?	7	41	48
6. Apakah anda termasuk anggota KUD Mina Tani atau KUD lain disekitar kawasan pelabuhan?	15	33	48
7. Apakah anda memanfaatkan pelayanan JAMSOSTEK?	4	44	48
<b>Jumlah Total</b>	<b>80</b>	<b>256</b>	<b>336</b>

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dari perhitungan pada tabel 31, dapat diperoleh skor untuk partisipasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ partisipasi} &= \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{336} \times 100 \% \\
 &= 23,8 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil skor dari tabel dan perhitungan di atas maka tingkat partisipasi masyarakat nelayan untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah sebesar 23,8 %. Minimnya tingkat pemanfaatan fasilitas yang ada ini disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk memenuhi pasokan es

balok maupun BBM pada dasarnya nelayan lebih mengutamakan membelinya di area pelabuhan, namun SPDN maupun pabrik es yang dikelola pihak perum ini memiliki kapasitas yang terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan nelayan. Bantuan kapal atau alat tangkap seringkali tidak dimanfaatkan oleh nelayan karena kapal atau alat tangkap tersebut tidak sesuai dengan karakteristik nelayan Lamongan maupun kondisi perairan di daerah penangkapan sekitar laut jawa. Sedangkan kurangnya partisipasi nelayan dalam memanfaatkan fasilitas dari KUD maupun bank adalah karena kebiasaan nelayan yang tidak suka menabung dan tidak memiliki jaminan untuk meminjam modal di bank. Nelayan berharap adanya kebijakan agar kapal bisa dijadikan jaminan saat peminjaman modal. Pelayanan JAMSOSTEK bagi nelayan diberikan ketika terjadi laka laut, namun kebanyakan nelayan tidak mempedulikan kesehatan maupun keselamatan diri mereka sendiri sehingga pelayanan JAMSOSTEK kurang dimanfaatkan oleh nelayan.

## **2. Partisipasi masyarakat nelayan melalui aktif di kegiatan organisasi**

Organisasi merupakan salah satu media pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi nelayan akan belajar bekerja sama dan meningkatkan kemampuan manajerialnya. Terdapat tiga organisasi yang berperan di masyarakat nelayan Lamongan, yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). HNSI ini membawahi 17 Rukun Nelayan (RN) yang tersebar di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran. Hasil penyebaran angket terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Partisipasi nelayan melalui aktif di kegiatan organisasi

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda sering mengikuti kegiatan Rukun Nelayan (RN)?	30	18	48
2. Apakah anda termasuk pengurus RN?	6	42	48
3. Apakah anda termasuk anggota POKMASWAS?	17	31	48
4. Apakah anda sering mengikuti kegiatan POKMASWAS?	30	18	48
5. Apakah anda termasuk anggota KUB?	15	33	48
<b>Jumlah Total</b>	<b>98</b>	<b>142</b>	<b>240</b>

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dari perhitungan pada tabel 32, dapat diperoleh skor untuk partisipasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ partisipasi} &= \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \% \\
 &= \frac{98}{240} \times 100 \% \\
 &= 40,83 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas diperoleh skor partisipasi masyarakat nelayan dalam organisasi sebesar 40,83 %. Nilai ini masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya fungsi RN sebagai penyalur aspirasi nelayan kepada pemerintah. Minimnya partisipasi nelayan terhadap organisasi RN selain faktor kesibukan melaut juga karena kurangnya kesadaran dari nelayan. Bagi nelayan yang aktif di RN, mereka menyadari bahwa melalui kegiatan RN, maka transfer informasi dari pemerintah akan langsung tersampaikan ke nelayan. Sedangkan sebagian nelayan yang lain masih belum menyadari fungsi dan manfaat organisasi RN.

POKMASWAS merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengawasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Keanggotaan di POKMASWAS ini bersifat

sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang peduli terhadap kelestarian sumberdaya perikanan. Anggota POKMASWAS ini aktif melaporkan pelanggaran-pelanggaran di laut seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang dan *illegal fishing* kepada petugas Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Partisipasi nelayan yang tergabung dalam POKMASWAS ini tentunya sangat mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian eksploitasi sumberdaya perikanan, mengingat PPN Brondong ini sebagai kawasan minapolitan namun dengan kondisi perairan yang dinyatakan sudah *over fishing*. Maka semakin banyak nelayan yang tergabung dalam POKMASWAS akan berdampak baik pada peningkatan ketertiban di laut.

KUB merupakan kelompok usaha yang dibina untuk meningkatkan perekonomian nelayan. Sebenarnya motivasi nelayan cukup tinggi untuk menjadi anggota KUB karena usaha yang dijalankan bersama-sama terasa lebih ringan daripada dijalankan secara individu namun nelayan tetap memperoleh keuntungan yang layak.

### **3. Partisipasi nelayan dalam mematuhi tata tertib**

Upaya pengembangan kawasan minapolitan akan berjalan lancar apabila didukung oleh partisipasi nelayan dalam mematuhi tata tertib. Dengan mematuhi tata tertib maka pemerintah akan mudah mengatur dan bekerja sama dengan masyarakat demi mewujudkan kegiatan perikanan yang maju. Tata tertib yang mengikat masyarakat nelayan diantaranya adalah tata tertib yang terkait dengan kelengkapan dokumen kapal, Surat Izin Berlayar (SIB), membayar retribusi, aturan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan tata tertib terkait kebersihan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam mematuhi tata tertib dapat dilihat berdasarkan penyebaran angket pada tabel 33.

Tabel 33. Partisipasi nelayan dalam mematuhi tata tertib

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda memenuhi kelengkapan dokumen kapal?	23	25	48
2. Apakah anda selalu mengurus Surat Izin Berlayar (SIB) setiap kali berangkat melaut?	11	37	48
3. Apakah anda menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan?	46	2	48
4. Apakah anda selalu membayar retribusi?	45	3	48
5. Apakah anda selalu menjaga kebersihan dan ketertiban area pelabuhan?	33	15	48
<b>Jumlah Total</b>	<b>158</b>	<b>82</b>	<b>240</b>

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dari perhitungan pada tabel 33, dapat diperoleh skor untuk partisipasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ partisipasi} &= \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \% \\
 &= \frac{158}{240} \times 100 \% \\
 &= 65,8 \%
 \end{aligned}$$

Diperoleh skor partisipasi nelayan dalam mematuhi tata tertib sebesar 65,8 %. Ini berarti lebih dari setengah nelayan yang ada di Kabupaten Lamongan telah mentaati tata tertib yang ada. Tata tertib yang sering diabaikan oleh nelayan adalah pengurusan dokumen-dokumen kapal terutama SPB. Dari hasil penyebaran angket, didapatkan hanya 11 nelayan yang rutin mengurus SPB. Nelayan merasa malas mengurus SPB karena harus dilakukan setiap kali mau berangkat melaut. Biasanya nelayan baru akan berbondong-bondong mengurus SPB setelah terkena tilang dari operasi di laut, terutama jika mereka memasuki

kawasan penangkapan daerah lain. Sebagian besar nelayan Lamongan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu payang dan *long line*. Karena pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap terlarang seperti trawl akan segera ditindak oleh Badan PSDKP setempat. Retribusi penggunaan jasa di kawasan pelabuhan tidak menjadi masalah yang berarti bagi nelayan, karena jumlah yang ditetapkan masih dianggap terjangkau bagi nelayan. Dari 48 angket yang disebar maka 33 orang menjawab tertib menjaga kebersihan di lingkungan pelabuhan, namun dari hasil observasi di lapang menunjukkan area pelabuhan masih terlihat kotor sehingga terkesan kumuh.

#### 4. Tingkat kesukarelaan masyarakat nelayan dalam berpartisipasi

Tingkat kesukarelaan masyarakat nelayan dalam berpartisipasi terhadap program pengembangan kawasanminapolitan dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34. Kesukarelaan nelayan dalam berpartisipasi

Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
	Ya ( 1 )	Tidak ( 0 )	
1. Apakah anda mengikuti kegiatan program (rakor/ pelatihan/ penyuluhan) dengan sukarela tanpa paksaan/imbalan?	36	12	48
2. Apakah anda mengurus dokumen-dokumen kapal dengan sukarela tanpa paksaan?	14	34	48
3. Apakah anda membayar retribusi penggunaan jasa di lingkungan pelabuhan dengan sukarela tanpa paksaan?	39	9	48
4. Apakah anda menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pelabuhan dengan sukarela tanpa paksaan?	32	16	48
<b>Jumlah</b>	121	71	192

Sumber : Data Primer Diolah 2012

Dari perhitungan pada tabel 34, dapat diperoleh skor untuk partisipasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\% \text{ partisipasi} &= \frac{\text{jumlah total jawaban 'ya'}}{(\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan})} \times 100 \% \\ &= \frac{121}{192} \times 100 \% \\ &= 63 \%\end{aligned}$$

Tingkat kesukarelaan masyarakat nelayan dalam berpartisipasi dianggap penting karena dengan berpartisipasi secara sukarela maka nelayan akan lebih muda diajak kerja sama dalam pembangunan. Dari skor yang diperoleh terkait kesukarelaan nelayan dalam berpartisipasi menunjukkan nilai sebesar 63 %. Ini berarti lebih dari setengah dari total nelayan yang ada mengikuti tata tertib maupun kegiatan dengan sukarela. Keterpaksaan nelayan hanya ketika harus mengurus dokumen-dokumen kapal. Hal ini disebabkan karena dokumen kapal seperti SIUP atau SIPI tidak bisa diurus langsung melewati syahbandar tetapi harus ke daerah tingkat propinsi, sehingga butuh waktu dan biaya transportasi. Pegawai syahbandar bersedia mengurus surat-surat tersebut asal biaya transportasi tetap ditanggung nelayan yang bersangkutan. Oleh karena itu nelayan biasanya dibantu oleh RN dalam mengurus dokumen tersebut.

### **5.6 Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan hasil data yang dihimpun melalui observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi pustaka, maka dapat dijabarkan faktor – faktor pendukung dan penghambat program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Faktor Pendukung

1. Pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan perikanan tipe B dengan kegiatan operasional yang tinggi dan fasilitas yang cukup memadai.
2. Letak geografis Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai kota penyangga/ pendukung Kota Propinsi (Surabaya).
3. Permintaan ikan segar maupun olahan oleh pasar masih sangat tinggi. Semua jenis ikan dalam jumlah berapa pun akan diserap oleh pasar.
4. Sebagian besar nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini akan menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan.

- Faktor Penghambat

1. Rendahnya kualitas SDM nelayan, hal ini menyebabkan beberapa hal yaitu:
  - Terbatasnya daya pikir nelayan untuk memahami konsep minapolitan sehingga nelayan cenderung berpikir jangka pendek.
  - Nelayan belum memahami pentingnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti bank, JAMSOSTEK, maupun bantuan kapal.
  - Nelayan masih sering mengabaikan tata tertib seperti menjaga kebersihan lingkungan TPI dan mengurus SIB.
2. Sumberdaya perikanan di Laut Jawa mengalami *over fishing*. Produksi hasil tangkapan mengalami penurunan.

3. Adanya keterbatasan dana dalam pembiayaan kegiatan program, hal ini karena anggaran dana yang turun tidak sesuai dengan anggaran dana yang diajukan serta tidak adanya sumber pendanaan selain dari APBN.
4. Terjadinya pembelian di atas kapal sebelum mendarat. Sehingga pelelangan menjadi kurang berfungsi, dan para pembeli ikan dari unit – unit pengolahan ikan tidak memiliki kesempatan untuk dapat membeli ikan di pelelangan. Akhirnya membeli dari tangan kedua dan harganya menjadi lebih mahal.
5. Kurangnya koordinasi antara *stakeholder* dan masyarakat sehingga timbul mis komunikasi dalam pembangunan *breakwater*. Masyarakat nelayan menolak rencana rancang bangun *breakwater* pada tahap pembangunan selanjutnya, dengan alasan teknis rancangan bangunan *breakwater* yang mendekati pintu masuk kolam pelabuhan tidak sesuai dengan kondisi perairan maupun arah angin disitu.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan proses implementasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan. Maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Profil minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu kawasan minapolitan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*. Komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Secara umum minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di pusat kegiatan (minapolis) dan kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*). Tim POKJA minapolitan dibentuk berdasarkan SK Bupati yang sudah ditetapkan.
2. Dari keragaan awal PPN Brondong berdasarkan enam pilar minapolitan, maka diperoleh indeks kesiapan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap sebesar 78,25. Ini berarti Kabupaten Lamongan siap melaksanakan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap namun dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan.

3. Dalam tahap implementasinya, pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaannya, yang disebabkan oleh faktor-faktor keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar *stakeholder*, perubahan struktur birokrasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan minapolitan.
4. Komitmen pemerintah daerah cukup tinggi terbukti dengan terpenuhinya persyaratan administrasi berupa SK kawasan dan SK POKJA, kesesuaian dengan RTRW daerah, masuk ke dalam RPIJMD, terbentuk *masterplan* program, kontribusi APBD dan berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat dalam bentuk rapat koordinasi.
5. Partisipasi masyarakat disini meliputi partisipasi dalam memahami dan mengikuti program minapolitan yaitu sebesar 8,92 %. Serta partisipasi masyarakat nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan di PPN Brondong, yaitu meliputi partisipasi dalam pemanfaatan fasilitas (sarana dan prasarana) sebesar 23,8 %, partisipasi dalam kegiatan organisasi sebesar 40,83 %, partisipasi dalam mematuhi tata tertib sebesar 65,8 %, dan tingkat kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi sebesar 63 %. Faktor utama penyebab minimnya partisipasi masyarakat terutama terhadap pemahaman terkait program minapolitan adalah karena SDM yang rendah, sehingga kemampuan berpikir mereka terbatas untuk memahami konsep minapolitan.
6. Faktor – faktor pendukung program diantaranya adalah pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan

Nusantara atau pelabuhan tipe B, letak Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai daerah penyangga kota propinsi (Surabaya), permintaan pasar untuk ikan segar maupun olahan masih sangat tinggi, sebagian besar masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

7. Sedangka faktor – faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM nelayan masih rendah, sumberdaya perikanan Laut Jawa mengalami *over fishing*, adanya keterbatasan dana; pelelangan di TPI kurang berfungsi; kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

## 6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi alternatif kebijakan untuk menunjang keberlanjutan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan :

1. Pihak pemerintah daerah hendaknya menyeimbangkan pertumbuhan keenam pilar pembangunan minapolitan (infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan *governance*) dengan lebih memperkuat pilar kelembagaan dan kebijakan. Akselerasi pertumbuhan dari pilar kelembagaan dan kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberian kebijakan-kebijakan yang pro nelayan.
2. Pemerintah daerah hendaknya mencari sumber pendanaan lain yang sah, misalnya dari BUMD sebagai alternatif untuk menambah kekurangan dana.
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat. Peningkatan koordinasi antar

*stakeholder* dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan rapat koordinasi sedangkan peningkatan koordinasi antara *stakeholder* dan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran penyuluh saat sosialisasi maupun pelaksanaan kegiatan program.

4. Perlu adanya pembentukan *Marine Protected Area* (MPA) basis masyarakat melalui optimalisasi peran POKMASWAS.

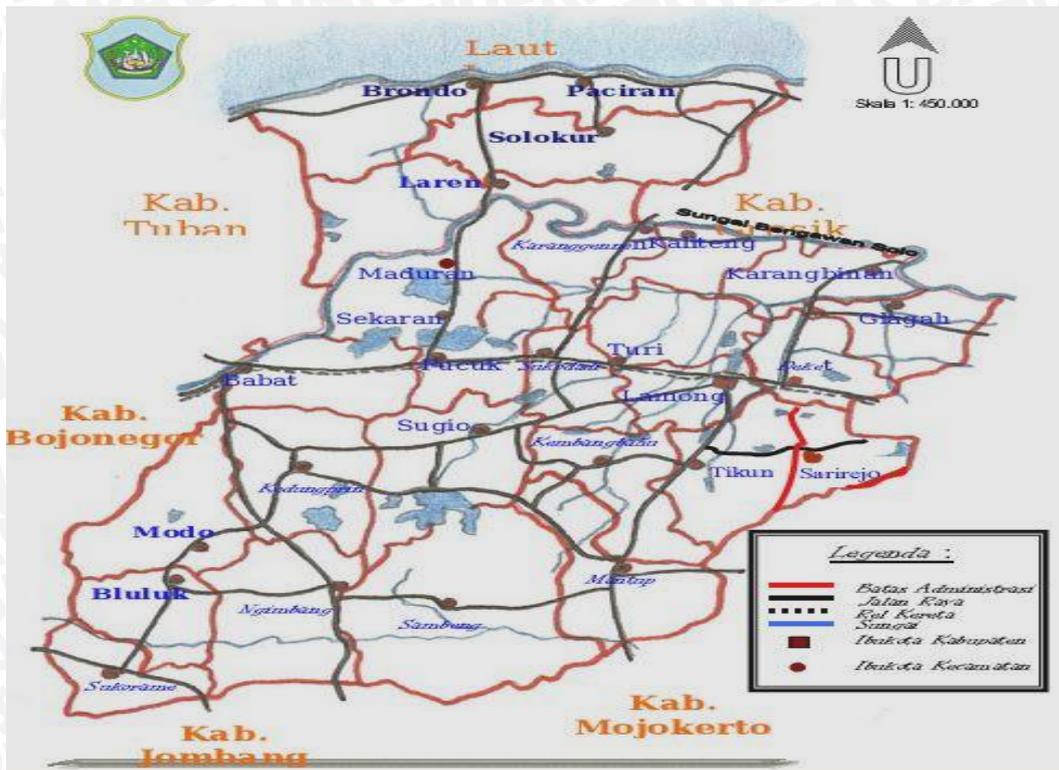


## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2012. **Pengertian Komitmen.** <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24961/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses 7 Januari 2012.
- Akib Haedar dan Tarigan Antonius, 2008. **Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan.** Universitas Negeri Makasar. Makasar.
- Bahagia, 2009. **Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Pasca Tsunami Di Kecamatan Baitussalam Tahun 2008.** Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Batavia.co.id, 2011. **Sejumlah PPN akan jadi Percontohan Minapolitan Perikanan Tangkap** [http://www.batavia.co.id.com/news/read/2011/08/16/50739/sejumlah\\_ppn\\_akan\\_jadi\\_percontohan\\_minapolitan/](http://www.batavia.co.id.com/news/read/2011/08/16/50739/sejumlah_ppn_akan_jadi_percontohan_minapolitan/). Diakses 7 Januari 2012
- Edward, George. C.1980. **Implementing Public Policy.** Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- HKTI.org, 2011. **Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap.** <http://hkti.org/2011/08/27/pengembangan-minapolitan-perikanan-tangkap.html>. Diakses 7 Januari 2012
- Karding, Abdul Kadir. 2008. **Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang.** Magister Administrasi Publik Universitas diponegoro. Semarang.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 tentang **Pedoman Umum Minapolitan.**
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/Men/2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perikanan Dan Kelautan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang **Penetapan Kawasan Minapolitan.**
- Kusumastanto, 2003. **Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah.** PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Marzuki, 2002. **Metodologi Riset.** Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan 2011. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

- Medanbisnis.co.id, 2011. **Sejumlah PPN akan jadi Percontohan Minapolitan** [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/08/16/50739/sejumlah\\_ppn\\_akan\\_jadi\\_percontohan\\_minapolitan/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/08/16/50739/sejumlah_ppn_akan_jadi_percontohan_minapolitan/). Diakses 7 Januari 2012
- Megapostnews.blogspot.com, 2011. **Giliran PPN Brondong dijadikan Minapolitan Percontohan.** <http://megapostnews.blogspot.com/2011/08/lamongan226.html>. Diakses 7 Januari 2012
- Narbuko Cholid dkk, 2008. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir Mohammad, 2005. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Renstra KKP, 2010. **Rencana Strategis kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014**. KKP. Jakarta.
- Septiayuningtyas, 2009. **Arahan Pengembangan Paket Wisata Kabupaten Sumenep**. Universitas Barwijaya. Malang.
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. **Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang**. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**. Alfabeta. Bandung.
- Suharto Edi, 2008. **Analisis Kebijakan Publik**. Alfabeta. Bandung.
- Surabayapost.co.id, 2011. **PPN Brondong akan dijadikan Mall Perikanan.** <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=441366dd2a977c3e86985a11e801804b&jenis=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e>. Diakses 7 Januari 2012. Pukul 14.00 WIB.
- Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setyadi, 2009. **Metode Penelitian Sosial**. Bumi Aksara. Jakarta
- Wiadnya Dewa Gede Raka, 2011. **Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.
- Yustina, Ida. 2003. **Perencanaan Program Penyuluhan**. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Zulham Armen dan Wardono Budi, 2010. **Perspektif Model Minapolitan Kawasan Pelabuhan Ratu**. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Zulham Armen, 2010. **Membangun Konsep Minapolitan**. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Lampiran 1. Letak Geografis dan Masterplan Pengembangan Kawasan PPN Brondong



Gambar 16. Letak geografis Kabupaten Lamongan



Gambar 17. Masterplan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong

Lampiran 2. Beberapa Fasilitas Penunjang di Kawasan PPN Brondong



Gambar 18. Kantor Perum PPS Cabang Brondong



Gambar 19. Kantor Payment Point BPR Jatim Cabang Brondong



Gambar 20. PUSKESMAS

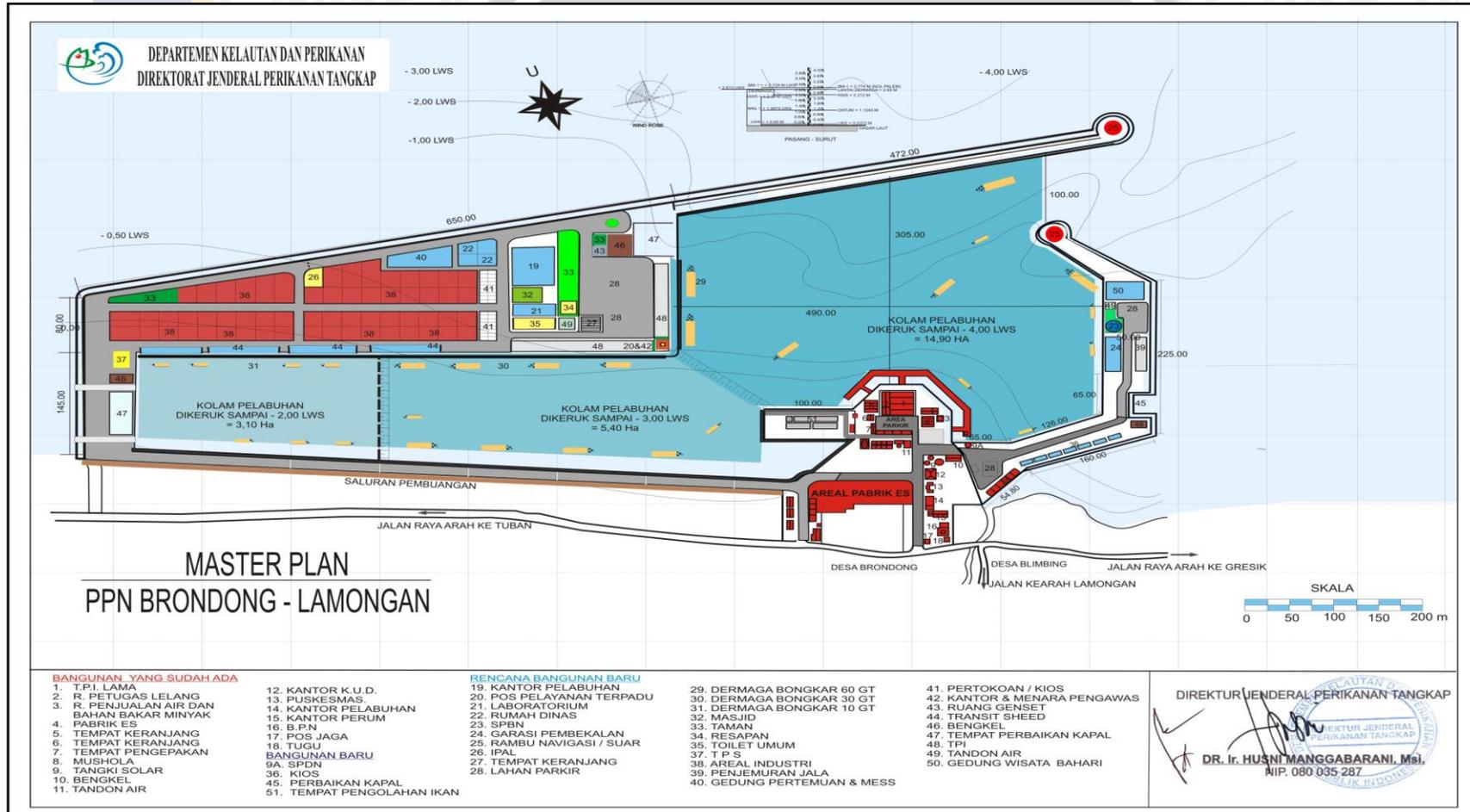


Gambar 21. Kantor Syahbandar

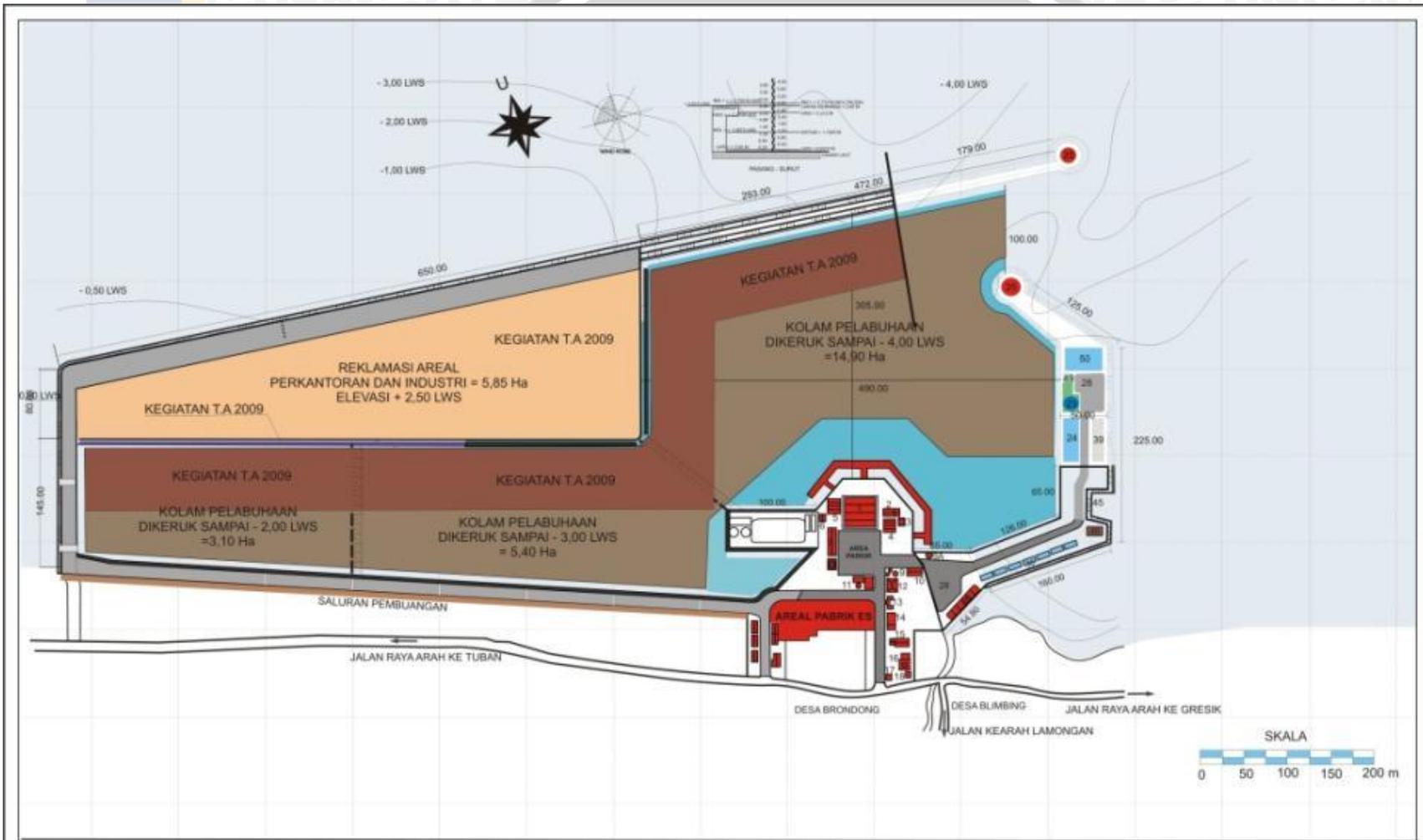


Gambar 22. Pelayanan JAMSOSTEK

Lampiran 3. Masterplan Pengembangan Tata Ruang di Kawasan PPN Brondong



Gambar 23. Masterplan pengembangan tata ruang di kawasan PPN Brondong



Gambar 24. Tahap pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana

Lampiran 4. Matrik Program Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan Tahun 2012

Tabel 11.1 Matrik Program Tahunan Kegiatan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan Tahun Ke-1 sampai Tahun ke-5

Tahun	KELompok Kegiatan	Kegiatan	Luas	Volume	Estimasi Biaya	Instansi	SKPD	APBN
Tahun 2012	INFRASTRUKTUR	Pembangunan Gedung Perwakilan PMU, kantor pemasaran, ruang pelatihan dan showroom	Tersedianya Gedung Perwakilan PMU, kantor pemasaran, ruang pelatihan dan showroom	350 m <sup>2</sup>	1.000.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, BAPPEDA, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPN BRONDONG	APBN
		Pemb. Menara Pengawas dan Pemasangan Lampu suar	Tersedianya menara Pengawas dan lampu suar	2 Unit	2.000.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, BAPPEDA, Camat Brondong dan Paciran	PPI Kranji	APBN
		Pembangunan Penahan Gelombang	Tersedianya Penahan Gelombang	500 m'	5.000.000.000	PU Pengaliran, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPI Kranji	APBN
		Pembangunan jalan masuk ke PMU	Terealisasinya pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan PMU	700 m	105.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengaliran, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPN BRONDONG	APBD I
		Pembangunan gedung untuk dolog perikanan serta prasarannya	Terealisasinya Pembangunan gedung untuk dolog perikanan serta prasarannya	600 m <sup>2</sup>	1.200.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPN BRONDONG	APBN
		Pembangunan Draenase	Tersedianya draenase di kawasan minapolitan	300 m <sup>2</sup>	1.385.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengaliran, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPN BRONDONG	APBN

Pembangunan IPAL	terealisasinya pembangunan IPAL	1 paket	1.524.000.000	Dinas PU, Bappeda	PPN BRONDONG	APBD I
Pembangunan Lahan Parkir	Tersedianya tempat parkir yang nyaman dan memadai	50 x 150 m <sup>2</sup>	1.431.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Berbasis perikanan Tangkap	Terwujudnya Sosialisasi kegiatan Pembangunan Berbasis perikanan Tangkap	1 Paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
Pembangunan Kolam Tambat labuh	Tersedianya Kolam Tambat Labuh	30.000 m3	3.000.000.000	Dinas PU Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBN
Pembangunan cold storage	Tersedianya cold storage	1 paket	2.500.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kec. Brondong	APBN
Penataan Lanskap PPI Kranji	Tersedianya Kawasan Yang nyaman, dan hijau	1 Unit	200.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD I
Pembangunan TPI baru yang Higienis	Tersedianya TPI yang Higienis yang memenuhi standart pasar Eropa	3240 m2	6.300.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBN
Pembangunan kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	Tersedianya kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) dan instalasi showroom	Terealisasinya pengadaan peralatan kantor (furniture, computer) dan instalasi showroom	1 paket	100.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Pemb. Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Brondong	Tersedianya Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Brondong	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bappeda	Kec. Brondong	APBN / APBD II
Pemb. Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	Tersedianya Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bappeda	Kec. Paciran	APBN / APBD II
Pengadaan kendaraan operasional Perikanan Tangkap	Terealisasinya kendaraan untuk operasional Penyuluhan dan Pembinaan bidang Tangkap	1 paket	330.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II

	Pendanaan operasional PMU	Terealisasinya penyediaan dana untuk operasional PMU	1 paket	400.000.000	KKP Pusat, Dinas Perikanan & Kelautan Lamongan		APBD I
	Pemb. Jalan CBC dan Rehab. Jalan menuju TPI	Terealisasinya Jalan CBC menuju TPI	1 paket	300.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
	Perbaikan dermaga TPI Labuhan Tengah	Terealisasi perbaikan dermaga	1 paket	500.000.000	PU Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Perbaikan dermaga TPI Labuan Barat	terealisasi perbaikan dermaga	1 paket	500.000.000	Dinas PU, Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pembangunan Jalan Komplek	Tersedianya jalan komplek di kawasan pelabuhan perikanan nusantara brondong	260 m2	5.000.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Pembangunan pintu gerbang	Tersedianya pintu gerbang di kawasan pelabuhan perikanan nusantara brondong	1 unit	662.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Pembangunan toilet umum	Tersedianya toilet umum yang bersih	unit	490.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Rehabilitasi sungai (pendalaman sungai)	Tersedianya kebutuhan air baku tambak ikan kerapu, udang vanamel dan bandeng	1,5 km x 2 m	300.000.000	Dinas Perikanan Kelautan, Bappeda, Camat Brondong	Desa Labuhan	APBD II
	Pembangunan jalan produksi	Tersedianya sarana jalan produksi yang memadai	2 km x 3 m	400.000.000	Dinas PU Cipta Karya, Bappeda, Camat Brondong	Desa Labuhan	APBD II
		<b>Sub total</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.427.000.000</b>			
<b>KEGIATAN PERIKANAN</b>	Desain paikah serta sarana <i>handling</i> ikan untuk kapal contoh	terealisasinya kapal contoh	2 paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	PPI KRANJI	APBD I
	Validasi Data Kapal penangkap Ikan dan Nelayan	Terealisasinya Validasi data Nelayan dan kapal Penangkap Ikan	1 paket	15.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

Pengadaan rumpon Dasar aparterpen ikan	Terealisasinya pengadaan rumpon	100 Paket	650.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD I
Pembuatan Kartu Nelayan	Terealisasinya Kartu Nelayan	10.000 buah	500.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBN
Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi usaha perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan	Terealisasinya layanan konsultasi	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
Inventarisasi pasar produk tangkap dan hasil olahan	Adanya dokumen pasar peroduk tangkap dan olahan	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Dinas KOPERINDAG , Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
Pengembangan budidaya laut melalui pelatihan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	80.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
Pembinaan pasca panen dan pemasaran	Meningkatnya ketrampilan teknis dalam penanganan pasca panen	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
Pelatihan penanganan ikan dikapal dan saat bongkar di pelabuhan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

10	Pelatihan permesinan kapal	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
11	Pelatihan dan pengenalan alat bantu penangkapan (GPS, Fish Finder, FAD)	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
12	Pelatihan manajemen operasi penangkapan ikan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
13	Pelatihan teknik penangkapan ikan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
14	Paket alat tangkap ramah lingkungan	Terealisasinya paket alat tangkap untuk 40 nelayan	1 paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
15	<del>Pembinaan/Pengembangan Usaha Perikanan</del>	terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), pembentukan Forum Komunikasi Minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan	1 paket	<u>50.000.000</u>	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
16	Pengadaan Sarana/basket untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuan Tengah	terealisasinya basket sebanyak 200 unit	200 unit	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

Pengadaan Radio SSB 2 Band sebagai fasilitas komunikasi di TPI Labuan Tengah	terealisasi pengadaan radio SSB	2	150.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD I
Pengadaan genset di TPI Labuhan Tengah	Terealisasinya pengadaan genst 3000 watt	1	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
Pengadaan mesin pompa air untuk TPI Labuhan Tengah	terealisasi pengadaan pompa air	1	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
Pengadaan Sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuhan Barat	terealisasinya basket sebanyak 200 unit	200 unit	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
Pengadaan Mesin pembersih lantai di TPI Labuhan Barat	terealisasi pengadaan mesin pembersih	1	2.500.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
Pengadaan genset di TPI Labuhan Barat	Terealisasinya pengadaan genset 3000 watt	1	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
Pengadaan timbangan	terealisasi pengadaan timbangan	6 Paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Semua TPI di kab. Lamongan	APBD I

	Pengadaan Sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan	terrealisasinya basket sebanyak 1000 unit	1000 unit	200.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Semua TPI di kab. Lamongan	APBD I
		<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.042.500.000</b>			
<b>KEGIATAN NON PERIKANAN</b>	Pembuatan profil Investasi	tersedianya dokumen Kelayakan teknis, FS; IRR; B/C ratio, sumber investasi, & pasar dari jenis usaha perikanan tangkap	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
	Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Keuangan /Permodalan daerah	Tersedianya lembaga keuangan dan permodalan sangat penting bagi para pelaku usaha minabisnis ini, sehingga harus diusahakan di lokasi sentra atau lokasi yang sangat mudah dicapai dari kawasan sentra.	1 paket	20.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
	Penggalangan modal Investasi budidaya laut/KJA	Skema dan realisasi permodalan usaha	1 paket	55.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD I
	Pembinaan pasar produksi perikanan tangkap dengan cold storage dan ekspor	PMU dan KJB menjadi penghubung nelayan untuk pasar luar daerah PMU dan ekspor	1 paket	80.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
	Penggalangan akses kemitraan usaha	Terjalinnnya kemitraan usaha:	1 paket	100.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KPDE, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD I

Pengembangan sistem informasi data perikanan tangkap	Format pengisian data perikanan dilengkapi dengan <i>software</i> dan peralatan <i>hardware</i> yang mendukung baik pada tingkat PMU maupun KKP	1 paket	100.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KPDE, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD I
Peningkatan peran kelembagaan ekonomi	BRI, BUMN, BANK JATIM, KUD, Swasta dan Investor lain memberikan peluang akses terutama bagi nelayan dan masyarakat miskin	1 paket	45.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KPDE, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
Pembuatan Profil Lembaga Organisasi Lokal	Tersedianya data kelompok usaha ekonomi produktif yang jelas dan terukur	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
<b>Sub Total</b>		Rp.	<b>500.000.000</b>			
<b>TOTAL TAHUN 2012</b>		Rp.	<b>38.969.500.000</b>			